



2021

LAPORAN KINERJA

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PENGAYOMAN

KATA PENGANTAR

Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, keberadaan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempunyai peranan yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan hukum nasional. Output kinerja BPHN terkait erat dengan beberapa isu strategis di bidang penataan regulasi serta pelayanan dan penegakkan hukum. Oleh karena itu pada tataran kinerja Kementerian Hukum dan HAM, BPHN harus memberi kontribusi pada pencapaian visi “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dengan melaksanakan misi Membentuk Peraturan Perundang-undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional dan Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja BPHN adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara khusus laporan kinerja tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Menteri Hukum dan HAM selaku pemberi mandat dalam perjanjian kinerja mengenai hasil kinerja yang telah dicapai BPHN tahun 2021. Berdasarkan perjanjian kinerja antara Menteri dengan Kepala BPHN tersebut, laporan kinerja menjabarkan 2 (dua) sasaran strategis yang menjadi target kinerja BPHN, yaitu “(1) Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan indikator kinerja utamanya adalah Indeks kualitas peraturan perundang-undangan dan (2) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan dengan Indikator kinerja utamanya terdiri atas (a) Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum, (b) Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah, (c) Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (d) Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (e)



Indeks kepuasan layanan bantuan hukum. Selain sasaran strategis BPHN juga mengampu 2 Sasaran Program yaitu Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum dengan 6 (enam) Indikator Kinerja.

Kami berharap laporan ini menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolok ukur peningkatan kinerja seluruh jajaran BPHN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kritikan dan masukan yang bersifat membangun masih kami perlukan untuk pelaksanaan kinerja BPHN tahun berikutnya.

Jakarta, 26 Januari 2022

Kepala BPHN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, SH., M.H.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
A. Tugas dan Fungsi	4
B. Struktur Organisasi	5
1. Pusat Perencanaan Hukum Nasional	6
2. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	6
3. Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum	7
4. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	7
5. Sekretariat Badan	8
C. Dukungan Sumber Daya Manusia	8
D. Permasalahan Organisasi	11
E. Sistematika Pelaporan	11
BAB II	13
PERENCANAAN KINERJA	13
A. Visi, Misi, Dan Ruang Lingkup Kerja	13
1. VISI	13
2. MISI	13
3. RUANG LINGKUP	13
B. Perjanjian Kinerja BPHN Tahun 2021	13
1. Sasaran Strategis	13
2. Sasaran Program	14



3. Sasaran Kegiatan.....	15
C. PRIORITY NASIONAL TAHUN 2021.....	16
D. RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2021	18
E. Pengukuran Kinerja.....	23
BAB III.....	24
AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021	24
1. Sasaran Strategis.....	24
2. Sasaran Program (SP)	27
3. Sasaran Kegiatan.....	30
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021	44
C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA PADA TAHUN 2021	48
1. Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum.....	48
2. Hasil Verifikasi dan Akreditasi OBH Baru (Gelombang I)	50
BAB IV	51
PENUTUP.....	51
LAMPIRAN.....	52



DAFTAR TABEL

Tabel 1	2
<i>Tabel 2. Sasaran Strategis BPHN</i>	14
Tabel 3 Sasaran Program.....	14
Tabel 4 Sasaran Kegiatan	15
Tabel 5 Proyek BPHN yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2021.....	17
Tabel 6 RKA BPHN.....	18
Tabel 7 RKA per Level Unit Eselon II.....	19
Tabel 8 Rincian Presentase Anggaran BPHN.....	20
Tabel 9 Perbandingan Pagu Tahun 2020 dan Tahun 2021.....	21
Tabel 10 Rincian Peningkatan Anggaran BPHN Tahun 2022.....	21
Tabel 11 Pagu BPHN Tahun 2020 sebelum dan sesudah revisi.....	22
Tabel 12 Total anggaran BPHN tahun 2022	22
Tabel 13 Sasaran Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan capaian 3 indikator	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Susunan organisasi BPHN	5
Gambar 2 Diagram Dukungan SDM BPHN.....	9
Gambar 3 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Gambar 4 Diagram SDM berdasarkan klasifikasi Jabatan	10
Gambar 5 Diagram Presentase Anggaran BPHN	20
Gambar 6 Anggaran dan Realisasi BPHN Tahun 2019-2021	45
Gambar 7 Rincian realisasi anggaran per Sasaran Program Tahun 2021	45
Gambar 8 Rincian realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan Tahun 2020.....	46



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2021 sebagai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional 2020-2024, yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024. Adapun capaiannya dapat diukur melalui indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategis dimaksud.

Berdasarkan data Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN) realisasi anggaran belanja sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 102.121.929.238,- (97,86%) dari total pagu anggaran Rp 104.350.398.000,- termasuk anggaran penyelenggaraan fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah dan penyelenggaraan kesadaran dan pemahaman hukum di wilayah. Anggaran tersebut dikelola untuk pencapaian kinerja output dan outcome Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang akan dicapai, yakni Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai pada tahun 2021 yakni, (1) terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan (2) terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum.

Untuk mengukur sasaran strategis dan sasaran program dimaksud, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa capaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan (Kolaborasi bersama Direktorat jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Sesuai dengan Tusi BPHN)	3,1	3,83	109%
2	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	76,61	92,85	121,20%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	70,0	79,64	113,78%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77,0	81,28	106%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	79,0	82,58	105%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Presentase
1	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20	20	100%
		2. Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan	25	27,27%	109%
2	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	76,61	92,85	121,20%
			77,0	81,28	106%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79,0	82,58	105%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	92,91	121,28%

Dalam mencapai realisasi Target kinerja dan anggaran yang berkualitas Badan Pembinaan Hukum Nasional memperoleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tingkat unit Eselon I adalah 93,41 dan selaku satuan kerja (SATKER) adalah 98,78. Penyerapan anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional yang optimal digunakan untuk pelaksanaan program pembinaan hukum dalam rangka pencapaian Sasaran Program dan IKU.



BAB I

PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Tujuan Reformasi Birokrasi ke depan diharapkan mengarah ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja, dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan *dynamic governance*. Reformasi birokrasi juga mendorong setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Reformasi birokrasi dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik *good governance* yang salah satu asasnya adalah akuntabilitas. **Asas Akuntabilitas** menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah **asas** yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP).

Selain untuk memenuhi asas akuntabilitas, laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi yang diemban adalah:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional;
- b. pelaksanaan perencanaan hukum, analisis dan evaluasi hukum, dokumentasi dan jaringan informasi hukum, serta penyuluhan dan bantuan hukum;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan hukum, analisis dan evaluasi hukum, dokumentasi dan jaringan informasi hukum, serta penyuluhan dan bantuan hukum;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, saat ini kelembagaan Badan Pembinaan Hukum Nasional terdiri atas 1 (satu) Sekretariat Badan dan 4 (unit) teknis yang kedepannya kerangka kelembagaannya harus dapat memperkuat dan mendukung peningkatan kualitas organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM. Adapun susunan organisasi BPHN seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Susunan organisasi BPHN



1. Pusat Perencanaan Hukum Nasional

Memiliki tugas melaksanakan perencanaan hukum nasional dan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran di bidang perencanaan hukum nasional;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan program legislasi nasional di lingkungan pemerintah, program penyusunan peraturan pemerintah, serta program penyusunan peraturan presiden;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan program legislasi nasional dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program legislasi nasional di lingkungan pemerintah, program penyusunan peraturan pemerintah, serta program penyusunan peraturan presiden;
- e. pelaksanaan, pengoordinasian, serta pemantauan dan evaluasi penyusunan naskah akademik;
- f. pelaksanaan penyelarasan naskah akademik rancangan undang-undang;
- g. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembentukan peraturan daerah;
- h. pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Pusat Perencanaan Hukum Nasional; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Perencanaan Hukum Nasional.

2. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengembangan, monitoring, pengelolaan sistem dan basis data jaringan dokumentasi informasi hukum nasional, serta pengelolaan layanan dokumentasi dan informasi hukum dan menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;

- b. penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan monitoring jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
- d. pelaksanaan pengelolaan sistem dan basis data jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
- e. pelaksanaan pengelolaan layanan dokumentasi dan informasi hukum;
- f. pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

3. Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

Dalam melaksanakan tugas melaksanakan penyuluhan dan bantuan hukum, dan pembinaan jabatan fungsional Penyuluhan Hukum, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Penyuluhan Hukum, pembudayaan hukum, dan bantuan hukum;
- b. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Penyuluhan Hukum, pembudayaan hukum, dan bantuan hukum;
- c. penyusunan dokumen pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Penyuluhan Hukum, pembudayaan hukum, dan bantuan hukum;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Penyuluhan Hukum, pembudayaan hukum, dan bantuan hukum; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

4. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

Dalam melaksanakan tugas analisis dan evaluasi hukum, serta pembinaan jabatan fungsional Analis Hukum, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran analisis dan evaluasi hukum, dan pembinaan jabatan fungsional Analis Hukum;

- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum;
- c. pelaksanaan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan audit hukum terhadap tingkat kepatuhan dan penerapan hukum serta unsur pendukungnya;
- e. pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum;
- f. penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional;
- g. pelaksanaan koordinasi dan pendampingan analisis dan evaluasi hukum dengan instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan;
- h. penyiapan pemberian tanggapan terkait kebijakan dan permasalahan hukum dari instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan;
- i. pembinaan, pengembangan, dan fasilitasi jabatan fungsional Analis Hukum; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional.

5. Sekretariat Badan

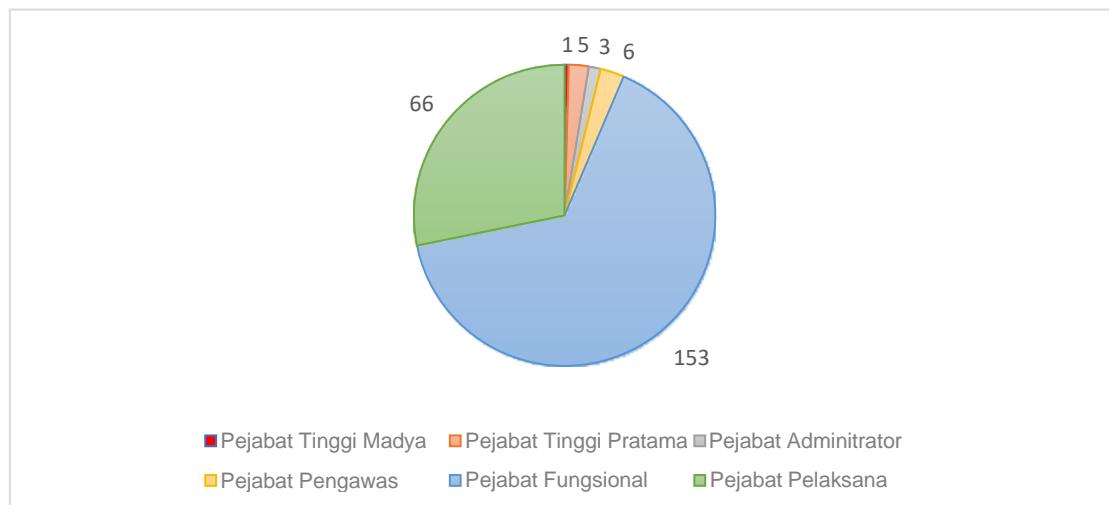
Dalam melaksanakan tugas memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi;
- c. evaluasi dan penyusunan laporan kinerja;
- d. pembinaan dan pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pengelolaan urusan barang milik negara;
- g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, kerja sama, dan keprotokolan; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan teknologi informasi.

C. Dukungan Sumber Daya Manusia

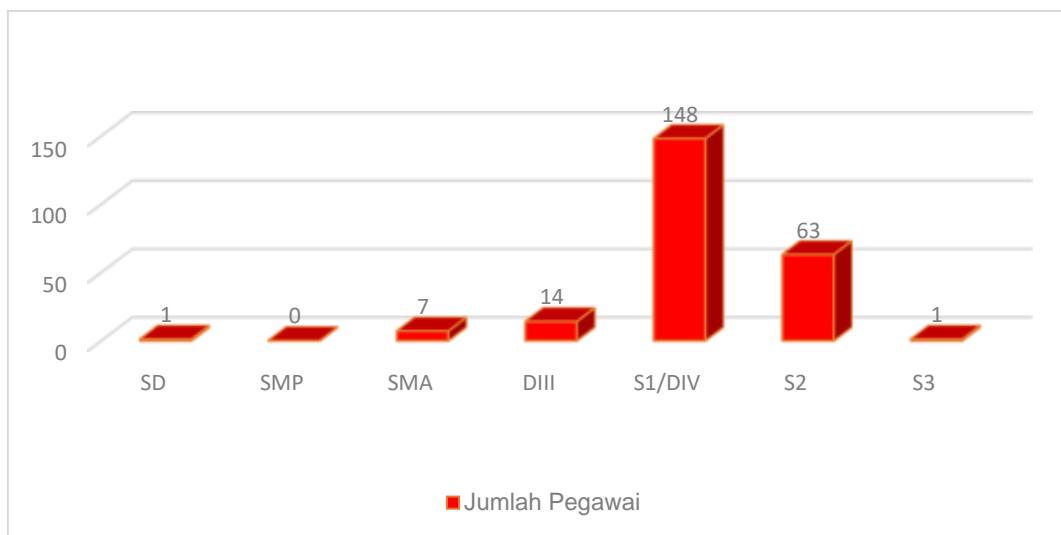
Dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional didukung oleh sumber daya manusia (SDM) dari multidisiplin keilmuan dan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMA, S1 dan S2 yang berjumlah 243 (dua ratus empat puluh tiga) dengan komposisi 133 laki-laki dan 110 perempuan. Pegawai yang pensiun pada tahun 2021 berjumlah 9 orang, mutasi

karena pindah tugas (JFU/Administrator/JFT) 5 orang, sehingga jumlah pegawai pada akhir desember 2021 adalah 234 orang dengan komposisi 124 orang pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 110 orang pegawai berjenis kelamin perempuan. SDM tersebut meliputi Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum dengan formasi sebagai berikut:



Gambar 2 Diagram Dukungan SDM BPHN

Potensi sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



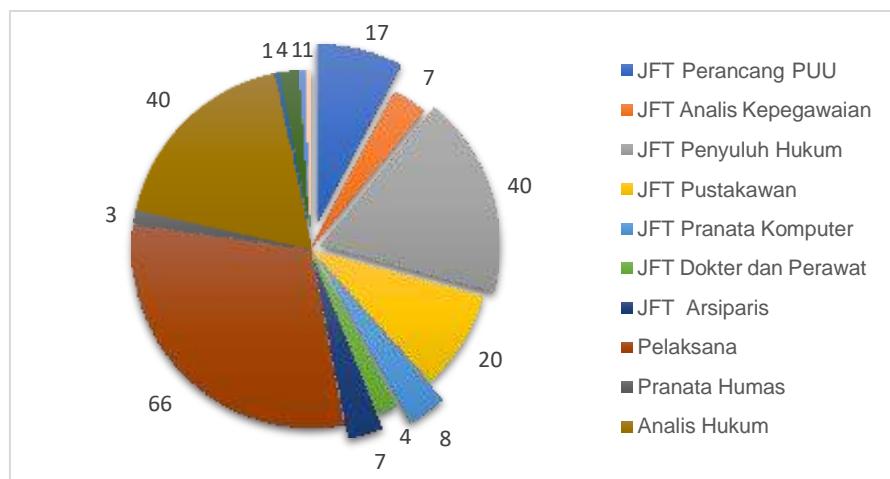
Gambar 3 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jika melihat grafik di atas maka dapat disimpulkan bahwa potensi sumber daya manusia di Badan Pembinaan Hukum Nasional sangatlah besar untuk membantu



meningkatkan kinerja organisasi dan mendukung pencapaian tujuan, mengingat pegawai dengan tingkat pendidikan strata satu (S1) berjumlah 148 orang atau sebesar 63,24% artinya lebih dari 50% pegawai BPHN ada pada tingkat pendidikan S1. Kemudian pada posisi kedua ada 63 Pegawai yang memiliki tingkat pendidikan hingga strata dua (S2) atau sebesar 26,92% dari total pegawai.

Potensi sumber daya manusia berdasarkan jabatan yang diampu dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 4 Diagram SDM berdasarkan klasifikasi Jabatan

Berdasarkan data yang disajikan di atas, jumlah pegawai yang menduduki jabatan fungsional meningkat sebagai akibat kebijakan penyetaraan (deselonisasi struktural) sehingga hampir seluruh pejabat Adminsitratör dan Pengawan dialihkan menjadi Pejabat Fungsional dengan fungsi koordinator dan subkoordinator. Jumlah JFT di BPHN saat ini adalah 153 orang atau 62,96%. Artinya lebih dari 50% Pegawai di BPHN adalah Pejabat Fungsional. Sedangkan pegawai dalam jabatan Pelaksana berjumlah 66 orang atau 27,2%. Jabatan fungsional di BPHN bervariasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPHN. JF penyuluhan hukum misalnya sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas yang terkait dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan sosialisasi bantuan hukum bagi masyarakat. JF perancang yang mendukung pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan hukum. Mulai dari penyusunan naskah akademik, penyelarasan naskah akademik dan perencanaan legislasi dan juga dilibatkan dalam proses perancangan rancangan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPHN. Selain itu perancang juga dilibatkan dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung terwujudnya

deregulasi peraturan perundang-undangan. Selain itu ada juga JF Pustakawan yang mendukung pelayanan informasi hukum baik online maupun offline. Sedangkan JFT Pranta Komputer mendukung terlaksananya inovasi menuju era pelayanan digital. Dan yang baru dirintis adalah jabatan fungsional analis hukum yang akan sangat menunjang tugas dan fungsi analisis dan evaluasi hukum dalam upaya penataan regulasi.

D. Permasalahan Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan belum optimal dimanfaatkan oleh K/L sebagai bahan penyusunan perencanaan hukum;
2. Dokumen Pembangunan Hukum Nasional yang dihasilkan belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh BAPPENAS sebagai bahan penyusunan RPJMN;
3. Pengelolaan dokumen dan informasi hukum belum tertata dengan baik;
4. Pengawasan pelaksanaan bantuan hukum belum dapat dilaksanakan secara optimal terutama dalam masa pandemi covid-19;
5. belum maksimalnya penyelenggaraan Tata Kelola persuratan yang efektif dan efisien;
6. Keterlambatan pertanggungjawaban yang diserahkan oleh Pelaksana Kegiatan;
7. Output pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak terpenuhi secara tepat waktu;
8. Terdapat dokumen arsip yang tidak bisa ditelusuri/ hilang karena belum maksimal dalam metode pengarsipan.

E. Sistematika Pelaporan

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi dan Permasalahan Organisasi.

2. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Perjanjian Kinerja tahun 2021 serta rencana kerja dan anggaran dan uraian mengenai pengukuran kinerja organisasi.

3. Akuntabilitas Kinerja

1) Realisasi kinerja BPHN

Pada subbab ini diuraikan realisasi kinerja BPHN berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis kementerian.

2) Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.

3) Capaian Kinerja Lainnya

4. Penutup

Pada BAB ini disampaikan simpulan atas pencapaian kinerja BPHN pada tahun 2021 dan rekomendasi perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun 2022.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi, Misi, Dan Ruang Lingkup Kerja

1. VISI

Sesuai Visi Kementerian Hukum dan HAM, BPHN sebagai salah satu unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, juga melaksanakan Visi yang sama untuk mendukung tugas Kementerian Hukum dan HAM yang ditujukan untuk menunjang Visi Presiden dan Wakil Presiden, yakni **“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

2. MISI

Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM mengemban 2 (dua) dari 7 (tujuh) misi yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM yakni : (1) Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional dan (2) Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

3. RUANG LINGKUP

- Penyusunan kebijakan;
- Pelaksanaan kebijakan; dan
- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan administrasi program Pembentukan Regulasi serta program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

B. Perjanjian Kinerja BPHN Tahun 2021

1. Sasaran Strategis

Kementerian Hukum dan HAM mempunyai 8 (delapan) sasaran strategis yang menjadi arah bagi pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Dari 8 (delapan) sasaran strategis tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional mengampu 2 (dua)

sasaran strategis yakni, (1) Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan dan (2) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Tabel 2. Sasaran Strategis BPHN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,1
2	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	7,61 70,0 77,0 79,0 76,61

2. Sasaran Program

Badan Pembinaan Hukum Nasional mengampu 2 program yakni (1) Program pembentukan regulasi dan (2) program penegakan dan pelayanan hukum yang terdiri dari 2 sasaran program dengan 6 indikator sasaran, yakni :

Tabel 3 Sasaran Program

No	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Target
1	Program Pembentukan Regulasi	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan 2. Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang	20 25



No	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Target
2	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	Masuk Ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan	
			1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61
			2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77
			3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79
			4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61

3. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis melalui program yang telah ditetapkan, BPHN menetapkan 7 Sasaran Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4 Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20
		2. Dokumen pembangunan hukum nasional	1
		3. Persentase JF Analis Hukum yang memenuhi standar kompetensi	80
2	Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis	1. Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan	25
		2. Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang	3
		3. Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan materi muatannya	7



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	66
4	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat	1. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif 2. Indeks kepuasan layanan perpustakaan 3. Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20 76,61 20
5	Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat	1. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 2. Persentase JF penyuluhan hukum yang memenuhi standar kompetensi 3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	70 80 76,61
6	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 5. Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	77 79 76,61 70 20
7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional 2. Jumlah Layanan Internal 3. Jumlah Layanan Perkantoran	1 1 1

C. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021

Pada tahun 2021 ada 6 (enam) prioritas nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Hukum dan HAM. Prioritas nasional tersebut dibagi dalam 2 (dua) jenis, yakni prioritas nasional utama Kementerian



Hukum dan HAM. BPHN dalam hal ini mengampu 2 jenis prioritas nasional tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5 Proyek BPHN yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2021

No	Jenis Prioritas Nasional	Nama Prioritas Nasional	Proyek Prioritas	Out Put Prioritas
1	PN Utama Kementerian Hukum dan HAM	1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bappenas	Penguatan layanan keadilan	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi
		2. Rencana Aksi Nasional TPB/SDG's BAPPENAS		Kegiatan Bantuan Hukum nonLitigasi
2	PN Dukungan Pada Mitra	1. Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi
				Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi
		2. Rencana Aksi Nasional HAM KSP	Pencegahan (kesiapsiagaan, kontra radikalilsasi, deradikalasisi)	Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah
			Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum	Optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum
			Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum	Optimalisasi layanan bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum
			Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum	Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum
			Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum	Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum



D. RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2021

Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dilakukan untuk mencapai efisiensi anggaran bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan. Penyusunan anggaran dalam dokumen RKA merupakan bagian dari penyusunan APBN. Secara garis besar, proses pentahapan penyusunan anggaran terbagi atas Pagu Kebutuhan, Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi DIPA.

Dari serangkaian proses penyusunan tersebut kemudian dihasilkan RKA BPHN yakni:

Tabel 6 RKA BPHN

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp.	1.626.868.000,-
2.	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp.	1.892.967.000,-
3.	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp.	2.398.217.000,-
4.	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	Rp.	1.602.376.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp.	33.235.775.000,-
JUMLAH		Rp.	40.756.203.000,-

Namun rencana kerja anggaran tersebut mengalami perubahan dengan adanya kebijakan refocusing anggaran dari Kementerian Keuangan dalam rangka penanganan Covid19 sehingga RKA berubah menjadi :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp.	1.555.003.000,-
2.	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp.	1.795.740.000,-
3.	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp.	2.398.217.000,-
4.	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	Rp.	1.517.829.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp.	32.073.961.000,-
JUMLAH		Rp.	39.340.750.000,-

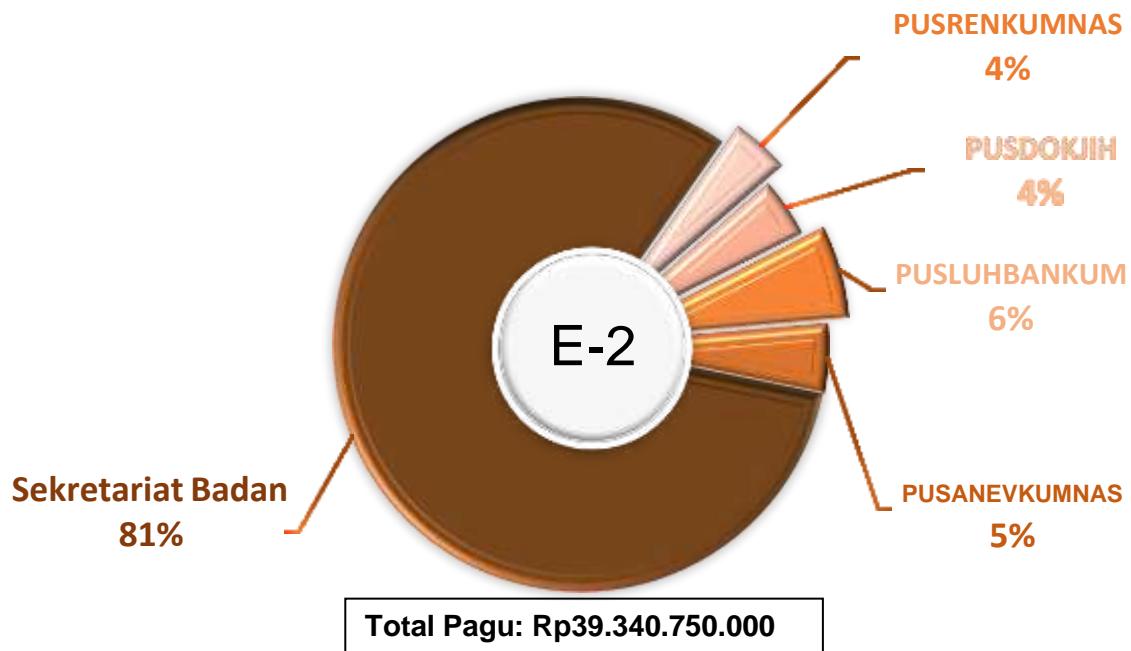
Rencana kerja dan anggaran ini kemudian diturunkan ke level eselon II yang terdiri atas 4 unit teknis (pusat) dan 1 sekretariat dengan rincian:

Tabel 7 RKA per Level Unit Eselon II

NO.	UNIT TEKNIS	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1.	Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	Dokumentasi dan Jaringan Hukum Nasional	1.555.003.000
		Fasilitasi Integrasi dan Pembinaan Lembaga	1.333.663.000
		Data dan Informasi Publik	221.340.000
2	Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Analisis dan Evaluasi Hukum	1.795.740.000
		Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1.795.740.000
3	Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	2.398.217.000
		Akkreditasi Lembaga	865.632.000
		Standarisasi Profesi dan SDM	517.953.000
		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	628.139.000
4	Pusat Perencanaan Hukum Nasional	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	1.517.829.000
		Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1.517.829.000
5	Sekretariat	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	32.073.961.000
		Layanan Perkantoran	27.633.710.000
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	426.717.000
		Layanan Umum	279.572.000
		Layanan Sarana Internal	2.225.584.000
		Layanan SDM	356.124.000
		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	198.964.000
		Layanan Kehumasan dan Protokoler	612.097.000
		Layanan Data dan Informasi	191.148.000
		Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	150.045.000
JUMLAH			Rp. 39.340.750.000



Dengan demikian dapat digambarkan alokasi anggaran per unit kerja Eselon II adalah sebagai berikut:



Gambar 5 Diagram Presentase Anggaran BPHN

Tabel 8 Rincian Presentase Anggaran BPHN

NO	UNIT KERJA ESELON II	ANGGARAN (RP)	PRESENTASE (%)
1	Pusat Perencanaan Hukum Nasional	1.517.829.000	4%
2	Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum	2.398.217.000	6%
3	Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	1.555.003.000	4%
4	Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	1.795.740.000	5%
5	Sekretariat Badan	32.073.961.000	81%
Jumlah		39.340.750.000	100%

Alokasi terbesar adalah untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretariat BPHN yaitu sebesar

Rp32.073.961.000 atau 81% dengan anggaran terbesar belanja pegawai. Dibandingkan tahun 2020 anggaran BPHN pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1,121,679,000, namun dengan kebijakan *refocusing* maka anggaran BPHN berkurang sebesar Rp1,415,453,000. Dan untuk tahun 2022 BPHN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp49,711,976,000 atau mengalami penambahan sebesar Rp8,955,773,000. Perbandingan anggaran Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

PROGRAM	ANGGARAN (2020)	ANGGARAN (2021)	NAIK/TURUN
Pembentukan Regulasi	Rp3,076,263,000	Rp3,313,569,000	Rp237,333,000
Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp2,958,324,000	Rp3,953,220,000	Rp999,896,000
Program Dukungan Manajemen	Rp33.599.937.000	Rp32.073.961.000	Rp1,525,976,000

Tabel 9 Perbandingan Pagu Tahun 2020 dan Tahun 2021

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa untuk tahun anggaran 2021 BPHN mengalami peningkatan dibanding tahun 2020. Untuk tahun 2022, BPHN juga mengalami peningkatan sebesar Rp8,955,773,000 dengan rincian :

Tabel 10 Rincian Peningkatan Anggaran BPHN Tahun 2022

PROGRAM	ANGGARAN	PENAMBAHAN ANGGARAN DARI TAHUN 2020
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 4,546,189,000.-	
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 4,572,643,000.-	↑ Rp. 8,955,773,000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 40,593,144,000.-	

Terkait dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2021, BPHN melakukan beberapa kali revisi dalam rangka refocusing anggaran untuk program penanganan covid-19. Pagu awal sebesar Rp40,756,203,000,- kemudian setelah direfocusing menjadi sebesar Rp39,340,750,000.



Anggaran ini belum termasuk anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum di wilayah yang dilaksanakan oleh 33 Kantor Wilayah. Dengan pagu awal Rp70,094,195,000 dan setelah direvisi berubah menjadi Rp65,009,648,000. Maka total Pagu BPHN pada tahun 2021 adalah Rp110,850,398,000 dan setelah direvisi total Pagu BPHN menjadi Rp104,350,398,000 dengan rincian:

Tabel 11 Pagu BPHN Tahun 2020 sebelum dan sesudah revisi

NO	UNIT KERJA	PAGU 2020	PAGU 2021 (AWAL)	PAGU 2021 (REVISI)
1	Satker BPHN	Rp39,634,524,000	Rp40,756,203,000	Rp39,634,524,000
2	Satker Kantor Wilayah (33 Kanwil)	Rp66,917,997,000	Rp70,094,195,000	Rp65,009,648,000
	Jumlah	Rp106,552,521,000	Rp110,850,398,000	Rp104,350,398,000

Untuk tahun 2022 Anggaran BPHN sebagai satuan kerja adalah Rp49,711,976,000 dan anggaran Program Pembentukan Regulasi dan Program Pelayanan dan Penegakan Hukum di wilayah adalah Rp72,094,195,000, sehingga total anggaran Unit BPHN tahun 2022 adalah Rp121,806,171,000 dengan rincian:

Tabel 12 Total anggaran BPHN tahun 2022

SATKER	ANGGARAN
BPHN	Rp49,711,976,000
33 Kantor Wilayah	Rp72,094,195,000
TOTAL	Rp121,806,171,000



E. Pengukuran Kinerja

Untuk melihat kemajuan capaian kinerja dan anggaran BPHN, secara periodik seluruh dilakukan monitoring melalui penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan, maupun laporan capaian kinerja persemester. Dari data dan laporan yang telah disampaikan dilakukan rapat evaluasi kinerja yang diikuti oleh seluruh Pejabat Eselon II dan Eselon III. Tujuan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi di antaranya:

1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja
2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja
3. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/relokasi anggaran
4. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan
5. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja
6. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

Kinerja BPHN tahun 2021 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh sasaran strategis, sasaran program, maupun sasaran kegiatan yang tertuang dalam Renstra BPHN periode 2020-2024. Adapun capaian kinerja utama BPHN tahun 2021 yang diuraikan berdasarkan Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
SS1 : Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang- undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,1	3,38	109,03

Formulasi pengitungan capaian:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{target} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat diketahui bahwa target Indeks Kualitas Perundang-undangan Tahun 2021 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 3,1 indeks sedangkan realisasinya adalah 3,38 indeks sehingga capaianya adalah 109%.

SS 2 :	Indikator 1	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	7,61	92,85	121,20

Target Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum pada tahun 2021 adalah 76,61 dengan formulasi pengitungannya adalah Survei kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan dokumentasi hukum. Survei dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan kepada pengguna yang telah melakukan akses ke website jdihn.go.id. Survei dilakukan melalui aplikasi survei



3AS Balitabang Hukum dan HAM dengan Hasil 92,85 sehingga nilai capaiannya adalah 121,20%. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum tersebut dapat diketahui bahwa target tahun 2021 telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan.

SS 2 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indikator 2 : Percentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Target	Realisasi	Capaian
		70	79,64	113,78%

Target Percentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah adalah 70% dengan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah desa binaan yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai desa sadar hukum}}{\text{usulan dari kantor wilayah}} \times 100\%$$

Tahun 2021 ada 280 desa binaan yang diusulkan oleh kantor wilayah dan 223 diantaranya dinyatakan sesuai dengan kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum. Terhadap 280 desa binaan yang diusulkan oleh kanwil target 70%nya sebanyak 196 desa/kelurahan, sehingga dengan capaian 223 desa/kelurahan maka persentase capaian untuk indikator 2 adalah 113,78%.

Berdasarkan hasil perhitungan Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah tersebut dapat diketahui bahwa target Tahun 2021 telah tercapai.

SS 2 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indikator 3 : Percentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Target	Realisasi	Capaian
		77	81,28	106%

Target persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 77% dengan formulasi hitung :

$$\frac{\text{Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai peraturan bantuan hukum}}{\text{seluruh permohonan bantuan hukum litigasi}} \times 100\%$$

Jumlah permohonan yang masuk 14.752 orang dan jumlah permohonan yang diterima sebanyak 11.990. Dengan demikian maka terhadap 14.752 permohonan yang masuk target 77% yang harus direalisasikan sebanyak 11.359 orang, sehingga dengan realisasi 11.990 orang maka persentase



capaian adalah 106%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa target telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan.

SS 2 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indikator 4 : Percentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Target	Realisasi	Capaian
		79	82,58	105%

Target persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 79% dengan formulasi hitung :

$$\frac{\text{Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum nonlitigasi sesuai peraturan bantuan hukum}}{\text{seluruh permohonan bantuan hukum nonlitigasi}} \times 100\%$$

Jumlah permohonan yang masuk 4.369 kegiatan dan jumlah permohonan yang diterima sebanyak 3.608 kegiatan. Dengan demikian maka terhadap 4.369 permohonan yang masuk target 79% yang harus direalisasikan sebanyak 3.452 permohonan, sehingga dengan realisasi 3.608 permohonan maka persentase capaian adalah 105%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa target telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan.

SS 2 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indikator 5 : Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Target	Realisasi	Capaian
		76,61	92,91	121,28%

Target Indeks kepuasan layanan bantuan hukum adalah 76,61 dengan formulasi penghitungannya adalah Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum. Survei dilakukan setahun sekali terhadap penerima bantuan hukum yang mendapatkan layanan bantuan hukum.

Survei dilakukan melalui "kuesioner Indeks kepuasan layanan bantuan hukum" menggunakan aplikasi survei 3AS yang dikelola oleh Badan Pemeneltian dan Pengembangan Hukum dan HAM terhadap kualitas pelayanan bantuan hukum setelah penerima bantuan hukum selesai menerima layanan bantuan hukum. Realisasi indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan bantuan hukum adalah 92,91 sehingga persentase capaianya adalah 121,28%.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks kepuasan layanan bantuan hukum tersebut dapat diketahui bahwa target tahun 2021 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.



2. Sasaran Program (SP)

Sasaran Program I :	Indikator Kinerja I	Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20	20	100%

Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2021 yang disampaikan ke K/L adalah 76 rekomendasi. Sedangkan rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh K/L adalah 16 Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian maka jika target presentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan adalah 20% maka realisasi yang harus dipenuhi yakni 16 Peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan perhitungan dengan formulasi hitung

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil AE tahun sebelumnya yang dimanfaatkan pembuat kebijakan}}{\text{rekomenadasi hasil AE PUU tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

dapat disimpulkan bahwa target tahun 2021 telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sasaran Program I :	Indikator Kinerja II	Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan	25	27,27	109%

Dari 44 Rancangan Undang-Undang Prakarsa Pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang diusulkan untuk masuk ke dalam daftar Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022, ada 12 Rancangan Undang-Undang Prakarsa Pemerintah yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahunan sesuai Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022) tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024.

Terhadap 44 Rancangan Undang-Undang Prakarsa Pemerintah, jika targetnya adalah 20% maka yang harus direalisasikan adalah 9 Rancangan Undang-Undang yang masuk ke dalam prolegnas prioritas tahunan, sehingga dengan realisasi 12 RUU maka persentase capaian adalah 109%.



Berdasarkan perhitungan dengan formulasi hitung :

$$\frac{\text{Jumlah RUU usulan pemerintah dalam Prolegnas Prioritas Tahunan}}{\text{jumlah RUU di lingkungan Pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020 – 2024}} \times 100\%$$

dapat disimpulkan bahwa target tahun 2021 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Sasaran Program 2	Indikator Kinerja I	Target	Realisasi	Capaian
<i>Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum</i>	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61	92,85	121,20%

Target Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum pada tahun 2021 adalah 76,61 dengan formulasi pengitungannya adalah Survei kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan dokumentasi hukum. Survei dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan kepada pengguna yang telah melakukan akses ke website jdihh.go.id. Survei dilakukan melalui aplikasi survei 3AS Balitabang Hukum dan HAM dengan Hasil 92,85 sehingga nilai capaiannya adalah 121,20%. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum tersebut dapat diketahui bahwa target tahun 2021 telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Sasaran Program 2	Indikator Kinerja II	Target	Realisasi	Capaian
<i>Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum</i>	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77	81,28	106%

Target persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 77% dengan formulasi hitung :

$$\frac{\text{Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai peraturan bantuan hukum}}{\text{seluruh permohonan bantuan hukum litigasi}} \times 100\%$$

Jumlah permohonan yang masuk 14.752 orang dan jumlah permohonan yang diterima sebanyak 11.990. Dengan demikian maka terhadap 14.752 permohonan yang masuk target 77% yang harus direalisasikan sebanyak 11.359 orang, sehingga dengan realisasi 11.990 orang (81,28%) maka persentase capaian adalah 106%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa target telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan.



Sasaran Program 2	Indikator Kinerja III	Target	Realisasi	Capaian
<i>Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum</i>	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79	82,58	105%

Target persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 79% dengan formulasi hitung :

$$\frac{\text{Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum nonlitigasi sesuai peraturan bantuan hukum}}{\text{seluruh permohonan bantuan hukum nonlitigasi}} \times 100\%$$

Jumlah permohonan yang masuk 4.369 kegiatan dan jumlah permohonan yang diterima sebanyak 3.608 kegiatan. Dengan demikian maka terhadap 4.369 permohonan yang masuk target 79% yang harus direalisasikan sebanyak 3.452 permohonan, sehingga dengan realisasi 3.608 (82,58%) permohonan maka persentase capaian adalah 105%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa target telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Sasaran Program 2	Indikator Kinerja IV	Target	Realisasi	Capaian
<i>Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum</i>	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	92,91	121,28%

Target Indeks kepuasan layanan bantuan hukum adalah 76,61 (baik) dengan formulasi penghitungannya adalah Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum. Survei dilakukan setahun sekali terhadap penerima bantuan hukum yang mendapatkan layanan bantuan hukum.

Survei dilakukan melalui "kuesioner Indeks kepuasan layanan bantuan hukum" menggunakan aplikasi survei 3AS yang dikelola oleh Badan Pemeneltian dan Pengembangan Hukum dan HAM terhadap kualitas pelayanan bantuan hukum setelah penerima bantuan hukum selesai menerima layanan bantuan hukum. Realisasi indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan bantuan hukum adalah 92,91 (sangat baik) sehingga persentase capaianya adalah 121,28%.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks kepuasan layanan bantuan hukum tersebut dapat diketahui bahwa target tahun 2021 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.



3. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan I :

Meningkatnya kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum

Indikator 1 :

Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan

Analisis dan Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki materi hukum yang ada (existing), tetapi juga untuk perbaikan terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat dan diharapkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia lebih berkualitas.

Tahun 2021, sasaran kegiatan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional adalah meningkatnya kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum menggunakan indikator kinerja Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan dengan target 20%. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang telah dianalisis dan evaluasi pada tahun 2020 yang ditindaklanjuti oleh K/L sebagai pembuat kebijakan.

Sasaran Kegiatan I	Indikator Kinerja I	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20	20	100%

Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020 yang disampaikan kepada 15 Kementerian/Lembaga adalah 76 rekomendasi. Rekomendasi tersebut dinilai memiliki urgensi cukup tinggi sehingga perlu segera ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait. Sedangkan rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh K/L adalah 16 Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas 6 Undang-Undang dan 10 Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian jika target persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan adalah 20% maka realisasi yang harus dipenuhi yakni 16 Peraturan perundang-undangan yang



ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan maka berdasarkan perhitungan dengan formulasi hitung :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil AE tahun sebelumnya yang dimanfaatkan pembuat kebijakan}}{\text{rekомендasi hasil AE PUU tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

dapat disimpulkan bahwa target tahun 2021 telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sasaran Kegiatan I :

Meningkatnya kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum

Indikator 2 :

Dokumen pembangunan hukum nasional

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional disusun untuk merancang suatu *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional, yang memuat prediksi perkembangan masyarakat baik global maupun regional yang mempengaruhi kehidupan sosial bangsa Indonesia, kondisi yang ada saat ini, serta strategi pembangunan hukum nasional di masa mendatang. Kontekstualitas pembangunan hukum tentu tidak terlepas dari pembangunan di bidang-bidang yang lain, karena pembangunan hukum merupakan bagian dari pembangunan sebuah bangsa.

Sebagai suatu dokumen yang berisi arah pembangunan hukum ke depan, *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional diharapkan dapat menjadi instrumen perencanaan bagi arah *pembangunan* hukum demi terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dokumen Grand Design Pembangunan Hukum Nasional ini karenanya akan menggambarkan visi, misi, permasalahan, tantangan, agenda, dan strategi pembangunan hukum nasional yang akan menjadi proyeksi pembangunan di bidang hukum hingga tahun 2045.

Sasaran Kegiatan I	Indikator Kinerja 2	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Dokumen pembangunan hukum nasional	1	1	100%



Target indikator kinerja 2 yang ditetapkan pada perjanjian kinerja adalah 1 dokumen pembangunan hukum nasional dengan formulasi hitung Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional. Dokumen Pembangunan Nasional adalah kompilasi hasil kegiatan analisis dan evaluasi Hukum yang dilakukan oleh kelompok kerja analisis dan evaluasi yang berisi arah pembangunan hukum, rencana dan strategi pembangunan hukum nasional ke depan, dan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan.

Terhadap target 1 dokumen pembangunan hukum nasional capaiannya adalah 100% karena pada tahun 2021 sudah dihasilkan 1 dokumen pembangunan hukum nasional. Sehingga dapat disimpulkan untuk indikator kinerja tersebut sudah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sasaran Kegiatan I :

Meningkatnya kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum

Indikator 3 :

Persentase JF Analis Hukum yang memenuhi standar kompetensi

Untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum telah dilaksanakan proses rekrutmen Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi pejabat fungsional analis hukum melalui sistem *inpassing*. Tujuannya lain: (1) terstandardisasinya kualifikasi dan kompetensi analis hukum; (2) terwujudnya integritas dan profesionalisme analis hukum berdasarkan sistem merit; (3) terwujudnya kejelasan akan tanggung jawab, hasil akhir, dan ukuran kinerja yang lebih terfokus dan terukur; serta (4) terciptanya independensi analis hukum.

Proses *inpassing* merupakan salah satu bentuk kegiatan pengembangan kompetensi analis hukum. Dimulai dengan dengan penyusunan kebijakan untuk mendukung proses pengembangan kompetensi hingga proses uji kompetensi pejabat analis hukum. Target pengembangan kompetensi pejabat fungsional analis hukum yang ditetapkan adalah 80% dengan formulasi hitung “Jumlah Pejabat Fungsional Analis Hukum yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Analis Hukum”

Kegiatan *inpassing* melalui uji kompetensi Jabatan Fungsional analis hukum yang diadakan pada Tahun 2021 diikuti oleh 1.217 pendaftar dan yang lolos seleksi



administratif berjumlah 805 orang. Hasil uji kompetensi kemudian meluluskan 718 orang yang kemudian diangkat sebagai Pejabat Fungsional Analis Hukum.

Terhadap target 80% yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Analis Hukum, 805 orang yang lulus seleksi administratis kemudian mengikuti bimbingan persiapan sebelum menjalani uji kompetensi sebagai Analis Hukum kemudian 718 orang atau 89,19% berhasil lolos dalam ujian dimaksud. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target tersebut telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Sasaran Kegiatan I	Indikator Kinerja 2	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase JF Analis Hukum yang memenuhi standar kompetensi	80	89,19	111,5%

Sasaran Kegiatan II :

Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis

Sasaran yang hendak dicapai dalam Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis adalah terwujudnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah dan meniadakan pertentangan dengan antara peraturan perundang-undangan yang ada (baik secara vertikal maupun horizontal) yang bermuara pada terciptanya hukum nasional yang adil. Selaras dengan tujuan negara yang hendak dicapai secara bertahap, maka dalam muatan yang terkandung harus sesuai dengan aspirasi masyarakat, mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mempunyai daya laku yang efektif di masyarakat.

Untuk mewujudkan kepastian hukum serta mendorong kinerja pembangunan yang lebih baik dibutuhkan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary action*) berupa revitalisasi hukum agar menjadikan hukum nasional sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, keadilan sosial dan kepastian hukum. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan antara lain peningkatan peran perencanaan legislasi nasional dan peningkatan kualitas naskah akademik yang menjadi acuan penyusunan norma. Sasaran tersebut telah tercapai jika diukur berdasarkan rata-rata capaian 3 indikator sebagai berikut:



Tabel 13 Sasaran Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan capaian 3 indikator

INDIKATOR	Target	Realisasi	CAPAIAN
1 Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan	25	27,27	109%
<p>Target Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan adalah 25% Jumlah Rancangan Undang-Undang Prakarsa Pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 adalah 44 RUU, sehingga untuk memenuhi target 25% tersebut minimal RUU prakarsa pemerintah yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun 2022 adalah 11 RUU berdasarkan formulasi hitung :</p>			

$$\frac{\text{Jumlah RUU usulan pemerintah dalam Prolegnas Prioritas Tahunan}}{\text{jumlah RUU di lingkungan Pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020 – 2024}} \times 100\%$$

Terhadap target 25% untuk Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang Masuk ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan realisasinya adalah 27,27% atau 12 RUU prakarsa pemerintah yang masuk dalam prolegnas prioritas tahunan pada tahun 2021 sesuai dengan Keputusan DPR Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target tahun 2021 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 109%.

INDIKATOR	Target	Realisasi	CAPAIAN
2 Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang	3	3	66,66%

Untuk Indikator Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang yang menargetkan 3 Naskah Akademik, jika dievaluasi berdasarkan formulasi hitung adalah jumlah naskah akademik yang disusun maka target



tersebut telah tercapai. Namun demikian 1 (satu) dari 3 naskah akademik yang disusun masih harus dilanjutkan penyusunannya pada tahun 2022 mengingat secara substansi masih membutuhkan pendalaman materi karena tidak hanya terkait dengan Kementerian/Lembaga tetapi juga dengan Lembaga Negara lain seperti Mahkamah Agung dan DPR RI. Adapun 3 (tiga) Naskah Akademik yang disusun tahun 2021 adalah: (1) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum tentang Jaminan Benda Bergerak; (2) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; dan (3) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi.

INDIKATOR	Target	Realisasi	CAPAIAN
3 Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan materi muatannya	7	12	171,45%

Indikator kinerja 3 pada Sasaran Kegiatan II menargetkan 7 naskah akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan materi muatannya. Jika capaianya didasarkan pada formulasi hitung “Jumlah Naskah Akademik RUU yang dimohonkan Penyelarasannya” maka terhadap target 7 Naskah akademik realisasinya adalah 12 Naskah akademik yang dimohonkan penyelarasannya oleh K/L. Dengan demikian maka capain terhadap target ini adalah 171,45% sehingga target telah tercapai bahkan capaianya lebih dari target yang telah ditetapkan. Adapun daftar naskah akademik yang dimohonkan penyelarasannya pada tahun 2021 :

No	Judul Naskah Akademik RUU	K/L yang mengajukan permohonan
1	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Naskah Akademik Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
2	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (<i>Treaty between The Republic of Indonesia and The Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters</i>).	Kementerian Hukum dan HAM
3	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata	Kementerian Hukum dan HAM



No	Judul Naskah Akademik RUU	K/L yang mengajukan permohonan
4	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Kementerian Keuangan
5	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
6	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS
7	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation in the Field of Defence</i>)	Kementerian Pertahanan
8	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Kementerian Hukum dan HAM
9	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Kementerian Komunikasi Dan Informatika
10	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Kementerian Hukum dan HAM
11	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan <i>International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance</i> (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa)	Kementerian Hukum dan HAM
12	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan <i>Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons</i> (Traktat Pelarangan Senjata Nuklir)	Kementerian Luar Negeri



Sasaran Kegiatan 3

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat

Upaya perbaikan terhadap hukum merupakan suatu kewajiban bagi Indonesia sebagai negara hukum. Upaya perbaikan tersebut dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif, yang dilakukan dalam proses pembangunan dan pembinaan hukum. Dalam perencanaan pembangunan hukum, bahwa saat ini terdapat beberapa permasalahan regulasi nasional. Untuk mengatasi permasalahan regulasi tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan tegas mengatakan bahwa penataan regulasi harus menjadi prioritas reformasi hukum, dan melalui Reformasi Hukum Jilid II dicanangkanlah Agenda Penataan Regulasi, yang salah satunya mencakup Pembuatan Database Peraturan PerundangUndangan yang terintegrasi.

Dalam rangka pemberian kontribusi yang optimal dalam pembangunan hukum nasional dan mendukung pencapaian sasaran kinerja Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dituntut untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu terkait masalah pembentukan peraturan perundang-undangan, jumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan informasi-informasi seputar hukum melalui upaya menyediakan dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat dan mutakhir serta kemudahan dalam mengakses informasi hukum. Kemudahan akses terhadap dokumentasi dan informasi hukum tersebut dapat meningkatkan pengetahuan hukum para Aparatur Negara, Penegak Hukum, kalangan Akademisi, dan berbagai profesi hukum lainnya, serta dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021, pencapaian terhadap sasaran kegiatan Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat adalah sebagai berikut :



INDIKATOR 1	Target	Realisasi	CAPAIAN
Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20	28,6	143%

Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional mempunyai tugas dalam pemberian strategi untuk dapat meningkatkan partisipasi aktif Anggota JDIHN. Yang dimaksud Anggota JDIHN aktif adalah Anggota JDIHN yang telah melakukan pengelolaan Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh instansinya melalui website JDIH. Pada tahun 2021 Indikator Persentase Anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif dengan capaian yang melebihi target yang ditetapkan. Dari target 20 (dua puluh) persen Anggota JDIHN yang Berpartisipasi Aktif atau sejumlah 320 dari penambahan website Anggota JDIHN telah tercapai 28,6 (dua puluh delapan koma enam) persen atau sejumlah 458 Anggota dari keseluruhan berjumlah 1600 Anggota JDIHN.

Formulasi penghitungan capaian Indikator *Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif* :

$$\frac{\text{Jumlah anggota JDIHN aktif}}{\text{jumlah anggota JDIHN}} \times 100\%$$

Indikator 2	Target	Realisasi	Capaian
2 Indeks kepuasan layanan perpustakaan	76,61	76,65	100%

Penyelenggaraan perpustakaan yang baik dapat dilihat dari keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan itu sendiri. Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan suatu perpustakaan adalah jumlah pengguna yang mengunjungi dan menggunakan layanan yang disediakan perpustakaan tersebut. Dalam indikator indeks layanan perpustakaan pada Pusat JDIHN dengan melakukan survei yang baru dilaksanakan tahun ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM. Survei



dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan kepada pengguna. Survei diberikan kepada pengguna yang telah melakukan akses ke website jdihn.bphn.go.id. Dengan jumlah responden yang sudah melakukan pengisian pada indeks kepuasan layanan perpustakaan, dari persentase target indikator sebesar indeks kepuasan layanan 76,61 maka pada Tahun 2021 ini dapat dicapai diperoleh hasil indeks 76,65 sehingga dapat disimpulkan bahwa target tersebut telah tercapai 100%.

	Indikator 3	Target	Realisasi	Capaian
3	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20	36,25	181%

Dalam menjalankan tugasnya, Anggota JDIHN melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya. Sementara itu, sebagai salah satu fungsi yang diselenggarakan oleh Anggota JDIHN adalah membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN. Dalam pelaksanaan capaian kinerja di Tahun 2021 pada indikator Persentase Website Anggota JDIHN Aktif yang Terintegrasi Dengan Portal/Sistem Integrasi JDIHN, Pusat JDIHN memiliki target sebesar 20 (dua puluh) persen dari jumlah anggota sebesar 1600 atau sejumlah 320. Namun dalam pelaksanaannya, realisasi terhadap target sebesar 36,25% atau sejumlah 581 Anggota JDIHN sehingga capaianya adalah 181%. Tingginya nilai realisasi ini disebabkan adanya Program Percepatan Integrasi yang dilakukan oleh Pusat JDIHN dengan membantu untuk membuatkan website JDIH kepada Anggota JDIHN dimana hosting website JDIH berada di Data Center Kementerian Hukum dan HAM. Pada pelaksanaan teknisnya, Anggota JDIHN menggunakan website JDIH dan mengelola dokumen hukum yang diterbitkan oleh institusinya. Apabila Anggota JDIHN sudah memiliki sarana



prasarana sendiri, data website JDIH ini bisa dimigrasikan ke server milik Anggota JDIHN.

Formulasi penghitungan capaian terhadap indikator Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN :

$$\frac{\text{Jumlah website anggota JDIHN yang terintegrasi}}{\text{jumlah anggota JDIHN aktif tahun berjalan}} \times 100\%$$

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat

Pembangunan hukum sebagai bagian integral dari Sistem Pembangunan Nasional, secara strategis merupakan landasan dan menjadi perekat bidang pembangunan lainnya serta sebagai faktor integratif, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembangunan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pada akhirnya tujuan dari proses pembangunan hukum adalah meningkatnya kesadaran hukum termasuk membuka akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat terhadap keadilan. Upaya mencapai sasaran tersebut dapat diukur melalui indikator kinerja yang ditetapkan. Pada tahun 2021 ada 3 (tiga) indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran kegiatan sebagaimana diuraikan:

Indikator Kinerja 1	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah	70	79,64	113,78%

Pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01- PR.08.10 TAHUN 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, sedangkan untuk teknis pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:



PHN.HN.03.05-73 TAHUN 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Program kegiatan pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan dibentuknya kelompok kadarkum, selanjutnya dilakukan pembinaan secara berkala kemudian setelah itu statusnya ditingkatkan menjadi desa/kelurahan binaan yang secara terus menerus mendapatkan pembinaan agar siap untuk diusulkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum. Pembinaan bagi kelompok kadarkum maupun desa/kelurahan sadar hukum dilakukan melalui kegiatan antara lain temu sadar hukum, simulasi, dan lomba kadarkum. Untuk menjadi desa/kelurahan sadar hukum, desa binaan harus melalui proses verifikasi dan penilaian oleh tim penilai dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.HN.03.05-73 TAHUN 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Desa binaan harus lolos dalam penilaian terhadap dimensi/aspek :

- a) Akses Informasi Hukum (20%);
- b) Implementasi Hukum (40%);
- c) Akses Keadilan (20%); dan
- d) Akses Demokrasi dan Regulasi (20%).

Dari dimensi di atas, kemudian dihasilkan indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan kategori :

- a) Desa/Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Tinggi;
- b) Desa/Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Cukup, dan
- c) Desa/Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Kurang.

Dari tahapan proses yang telah dijelaskan di atas, hanya Desa/Kelurahan yang memiliki hasil indeks penilaian tinggi yang dianggap memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum dan dapat diberikan penghargaan/gelar Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa Sasana Kelurahan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah mengajukan usulan terhadap desa/kelurahan binaan yang dinilai sesuai dengan kriteria untuk menjadi



desa/kelurahan sadar hukum. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung percepatan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di wilayah mengingat kondisi pemerintah daerah yang berbeda disteiap wilayah maka akan memudahkan jika inisiasi rekomendasi dilakukan oleh Kantor Wilayah selaku pembina kadarkum dan desa/kelurahaan binaan di wilayah.

Pada tahun 2021, Kantor Wilayah telah mengajukan usulan atas 280 desa binaan kepada Tim Penilai di Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk dilakukan verifikasi. terhadap 280 desa/kelurahan yang diusulkan 223 dinyatakan lolos verifikasi sesuai dengan kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum sehingga realisasinya adalah 79,64% dengan persentase capaian sebesar 113,78%. Perhitungan capaian keberhasilan ini didasarkan pada formulasi hitung Indikator Kinerja :

$$\frac{\text{Jumlah desa binaan yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai desa sadar hukum}}{\text{usulan dari kantor wilayah}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa target Tahun 2021 telah tercapai.

Indikator Kinerja 2			
Percentase JF Penyuluhan Hukum yang Memenuhi Standar Kompetensi	80	81,32	101%

Berkaitan dengan peran penyuluhan hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku instansi Pembina Pejabat Penyuluhan Hukum di seluruh Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar. Termasuk bagaimana agar peran Penyuluhan Hukum dapat dioptimalkan sehingga mampu menciptakan masyarakat cerdas serta sadar hukum. Untuk itu Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki tanggung jawab selain penyusunan kebijakan di bidang penyuluhan hukum, termasuk meningkatkan standar kompetensi yang dimiliki oleh seorang Penyuluhan Hukum. Salah satunya melalui kegiatan pengembangan kompetensi pejabat fungsional penyuluhan hukum. Standar kompetensi jabatan fungsional penyuluhan hukum merupakan ukuran kriteria kemampuan meliputi aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional di bidang penyuluhan hukum.

Indikator kinerja terkait “Presentase JF Penyuluhan Hukum yang memenuhi standar kompetensi dengan target 80% pada tahun 2021 dengan formulasi hitung Indikator kinerja “Jumlah Pejabat Fungsional Penyuluhan Hukum yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluhan Hukum”. Dari 423 Pejabat



Fungsional Penyuluhan Hukum yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dalam bentuk webminar dan FGD secara daring (mengingat situasi pandemik dan pembatasan kegiatan kemasyarakatan) adalah 423 orang serta yang mengajukan penilaian angka kredit dalam rangka kenaikan jenjang sebanyak 344 orang. Kenaikan jenjang ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga substantif. Kemampuan seorang Pejabat Penyuluhan Hukum yang telah mengalami peningkatan akan menjadi ukuran peningkatan atas standar kompetensinya. Berdasarkan evaluasi data pelaksanaan kegiatan maka dapat disimpulkan realisasi dari target 80% Pejabat Fungsional Penyuluhan Hukum yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluhan Hukum adalah 81,32% dengan nilai capaian 101%. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi terhadap target telah tercapai.

Indikator Kinerja 3			
Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	76,61	92,91	121,28%

Dalam rangka pemberian akses keadilan bagi masyarakat dan menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum tersebut, yang tercermin di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Fungsi Bantuan Hukum adalah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat khususnya Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin yang berhadapan dengan hukum yang dalam hal ini ditangani Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai penyelenggara program bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum dilakukan oleh organisasi yang telah terverifikasi dan terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum, sesuai dengan perintah Undang-Undang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan tugas BPHN sebagai penyelenggara bantuan hukum, serta meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum. Langkah untuk mengetahui tingkat kualitas layanan bantuan hukum adalah dengan mengukur indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum. dalam Rencana Strategis BPHN Tahun 2020-2021 indeks kepuasan layanan bantuan hukum merupakan salah satu target yang ditetapkan sebagai indikator kinerja.



Target Indeks kepuasan layanan bantuan hukum adalah 76,61 dengan formulasi penghitungannya adalah Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum. Survei dilakukan setahun sekali terhadap penerima bantuan hukum yang mendapatkan layanan bantuan hukum.

Survei dilakukan melalui "kuesioner Indeks kepuasan layanan bantuan hukum" menggunakan aplikasi survei 3AS yang dikelola oleh Badan Pemeneltian dan Pengembangan Hukum dan HAM terhadap kualitas pelayanan bantuan hukum setelah penerima bantuan hukum selesai menerima layanan bantuan hukum. Realisasi indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan bantuan hukum adalah 92,91 sehingga persentase capaiannya adalah 121,28%.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks kepuasan layanan bantuan hukum tersebut dapat diketahui bahwa target tahun 2021 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

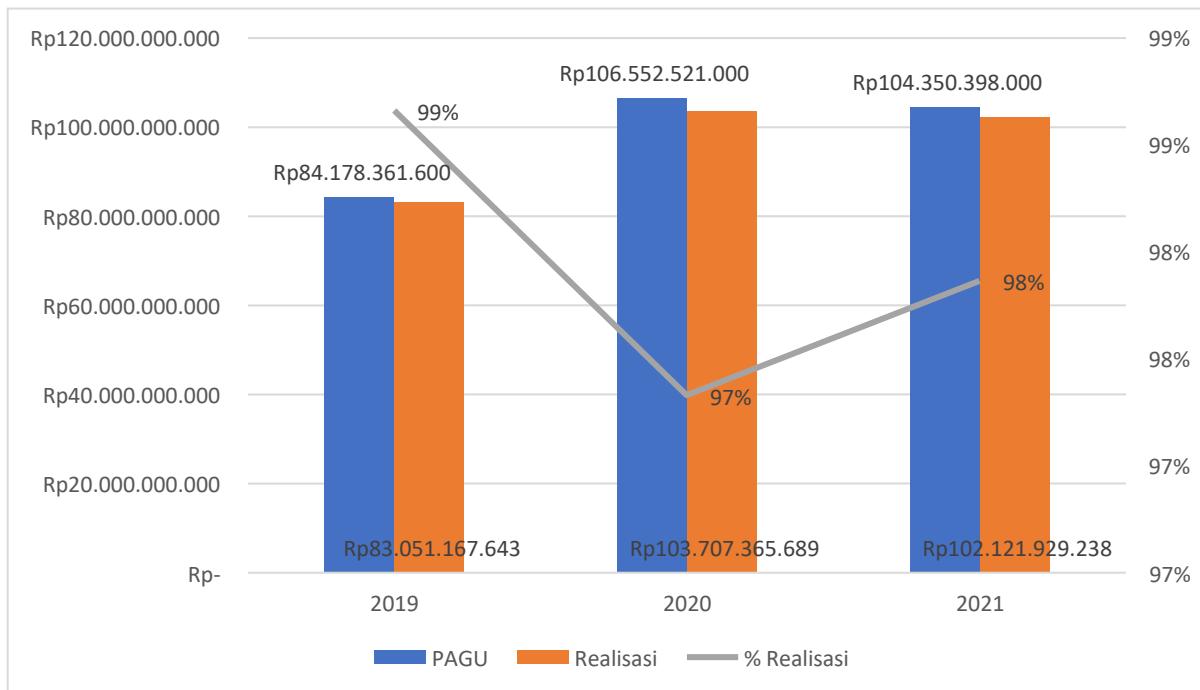
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

1. Capaian Realisasi Anggaran

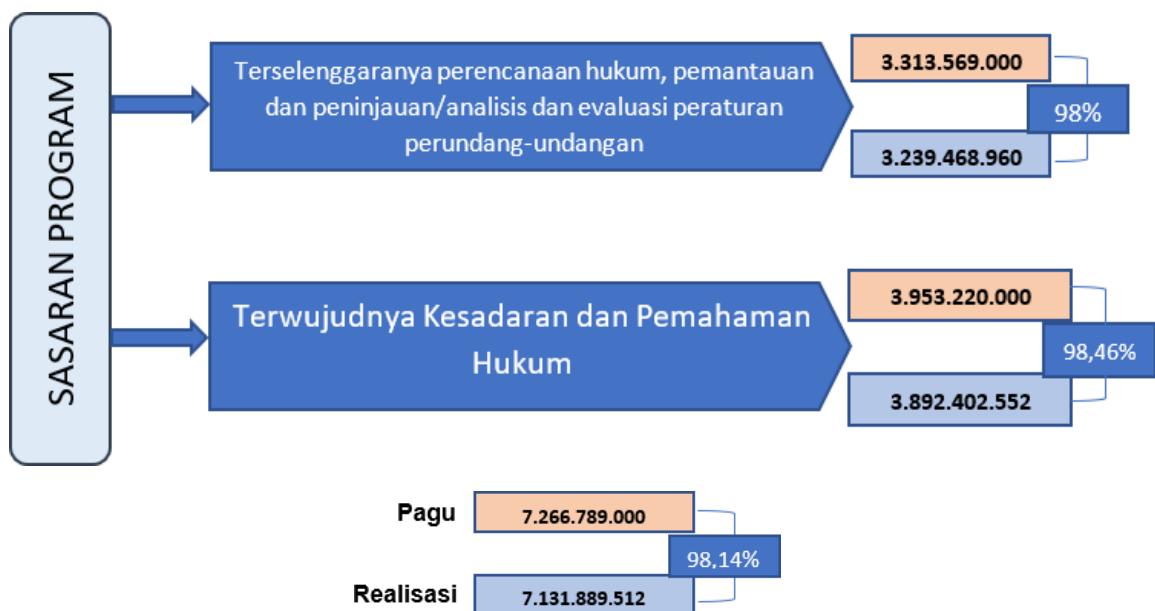
Realisasi anggaran Tahun 2021 sebesar Rp102,121,929,238 atau sebesar 98% dari total pagu sebesar Rp104,350,398,000. Presentasi realisasi ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 97,33% dari total pagu Rp106,552,521.000. Anggaran ini sudah termasuk anggaran kegiatan pembinaan Hukum di Wilayah. Pagu BPHN selaku satuan kerja untuk pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2021 adalah Rp40,756,203,000 yang kemudian direvisi karena refocusing untuk penanganan covid-19 sehingga total Pagu setelah revisi adalah Rp39,340,750,000, dengan realiasi Rp38,605,725,635 atau sebesar 98,13%.

Realisasi penyerapan terhadap pagu dalam periode tahun 2019-2021 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:



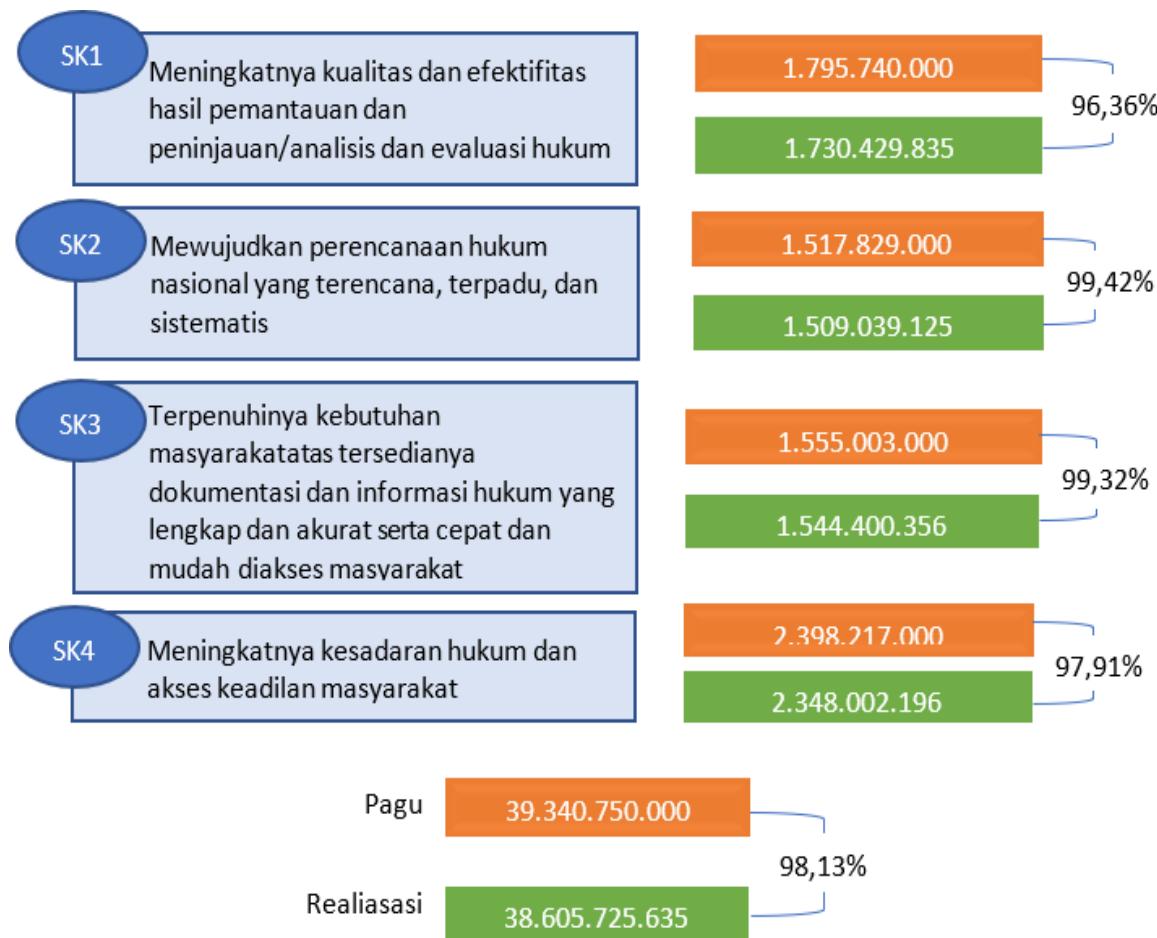
**Gambar 6 Anggaran dan Realisasi BPHN Tahun 2019-2021**

penghitungan capaian realisasi anggaran : $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu}} \times 100\%$

**Gambar 7 Rincian realisasi anggaran per Sasaran Program Tahun 2021**

penghitungan capaian realisasi anggaran : $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu}} \times 100\%$



Gambar 8 Rincian realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan Tahun 2020

penghitungan capaian realisasi anggaran : $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Total Pagu}} \times 100\%$

Rincian realisasi anggaran per kegiatan disajikan dalam Lampiran 3

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{target biaya (pagu)}} \times 100 \right]$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp.38.605.725.635 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp.39.340.750.000. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 1,87%. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat



diasumsikan bahwa pada tahun 2021 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

Jika dilihat dari sisi efisiensi kinerja, dengan membandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 21,41% maka dengan nilai rata-rata realisasi anggaran sebesar 98,41% nilai efisiensi kinerja adalah -76,82% dengan rincian sebagai berikut:



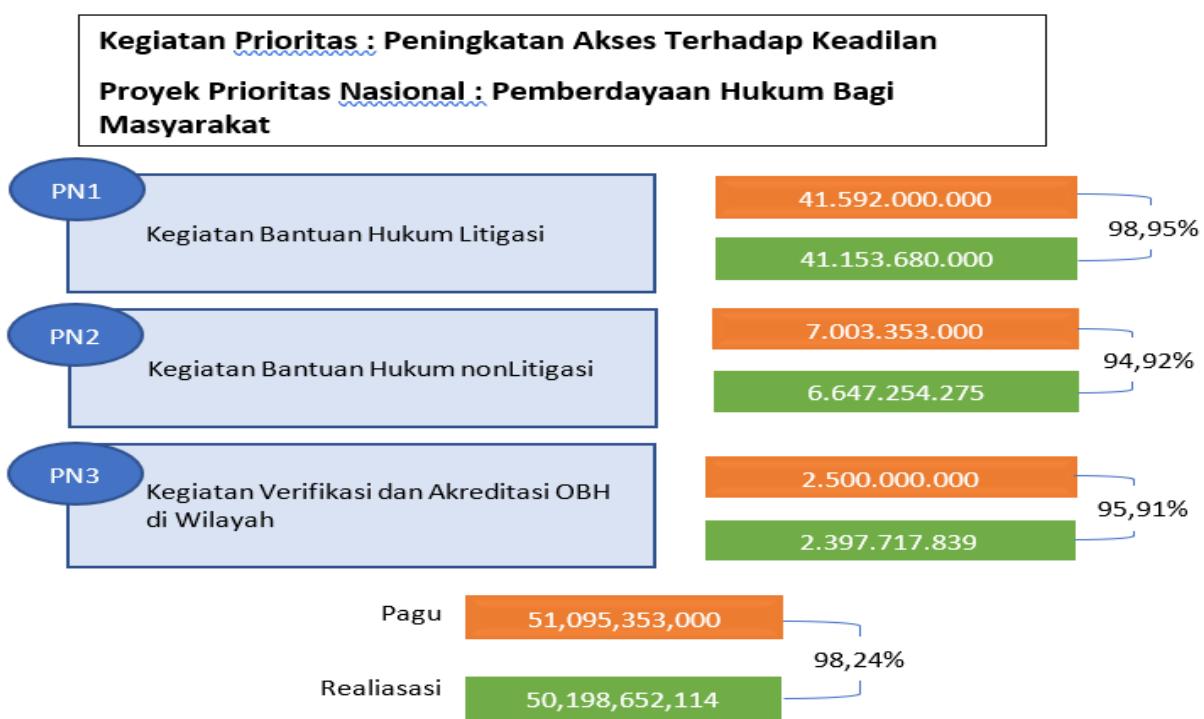
$$\text{Efisiensi Kinerja} = \text{Realisasi Kinerja} - \text{Realisasi Anggaran}$$

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan. Termasuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh OBH sebagai Pemberi Bantuan Hukum, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai narasumber, anggota tim kelompok kerja dalam kegiatan analisis dan evaluasi hukum maupun penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang.

3. Realisasi Anggaran Program Prioritas Nasional

Adapun khusus kegiatan Prioritas Nasional RKP, realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp50,198,652,114 (98,24%) dari alokasi anggaran awal sebesar Rp56,179,900,000. Pagu ini kemudian direvisi untuk *refocusing* sehingga menjadi Rp51,095,353,000. Realisasi tersebut terbagi dalam 3 Prioritas Nasional yang menjadi tanggung jawab BPHN yaitu:





C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA PADA TAHUN 2021

1. Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum

Sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah tersebut, PBH yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan akreditasi. Pelaksanaan verifikasi dan akreditasi PBH dilakukan setiap 3 (tiga) tahun dan pada tahun 2021 ini verifikasi dan akreditasi dilakukan untuk menjaring PBH periode 2022- 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, menyatakan bahwa pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi dilakukan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi selaku penentu lolos atau tidaknya organisasi menjadi PBH, dibantu oleh Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.



Guna memberikan panduan bagi Panitia Verifikasi dan Akreditasi, Kelompok Kerja, Calon PBH dalam rangka mempersiapkan segala hal yang diperlukan atau disyaratkan, serta langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi serta Perpanjangan Sertifikasi, telah dilakukan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.03-14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Verifikasi, Akreditasi, I dan Perpanjangan Sertifikasi Bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum, yang merupakan perubahan dari Petunjuk Pelaksanaan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.03-09 Tahun 2018 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Serta Perpanjangan Sertifikasi.

Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi PBH periode 2022-2024 dilaksanakan dalam 2 Gelombang, yaitu Gelombang I untuk Calon PBH (OBH Baru) dan Gelombang II untuk Perpanjangan Sertifikasi PBH Periode 2019-2021. Selanjutnya berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, Pokjada pada Kantor Wilayah telah melakukan verifikasi tingkat Daerah terhadap kelengkapan dokumen pendaftaran Calon PBH dengan melakukan verifikasi administrasi dan dokumen fisik, serta melakukan pemeriksaan faktual lapangan (kantor/sekrerariat). Verifikasi dan pemeriksaan faktual lapangan yang telah dilaksanakan Pokjada menghasilkan Rekomendasi Calon PBH yang akan disampaikan kepada Pokjapus.

Sebanyak 1.093 Calon PBH baru melakukan permohonan pendaftaran verifikasi dan Akreditasi pada Gelombang I melalui aplikasi Sidbankum. Namun yang direkomendasikan Pokjada ke Pokjapus Badan Pembinaan Hukum Nasional berdasarkan hasil verifikasi hanya sebanyak 332 Calon PBH, tetapi pada aplikasi Sidbankum juga terdapat Calon PBH yang secara sistem lolos verifikasi data namun tidak direkomendasikan Pokjada yaitu sebanyak 73 Calon PBH. Pada pendaftaran Gelombang I berdasarkan hasil verifikasi ditetapkan sebanyak 121 Calon PBH yang lolos verifikasi dan berhak mendapatkan akreditasi.

Adapun progress pelaksanaan verifikasi dari jumlah PBH periode 2019-2021 sebanyak 524 PBH, sebanyak 511 PBH mengajukan permohonan perpanjangan sedangkan 13 PBH tidak mengajukan permohonan perpanjangan, dari 511 PBH yang mengajukan permohonan perpanjangan sebanyak 498 lolos verifikasi dan berhak mendapatkan akreditasi, sedangkan 7 PBH tidak kirim data/dikembalikan untuk perbaikan dan sebanyak 6 PBH dicabut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:



2. Hasil Verifikasi dan Akreditasi OBH Baru (Gelombang I)

OBH Baru Yang mendaftar	OBH yang direkomendasikan Pokja daerah	OBH Baru yang mendapat akreditasi
1.093	332	121
Hasil Verifikasi dan Akreditasi OBH Lama (Gelombang II) – 524 PBH		
PBH yang mengajukan permohonan perpanjangan	PBH tidak lolos/dicabut	lolos verifikasi dan berhak mendapatkan akreditasi
511	13	498

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan OBH yang terjaring menjadi Pemberi Bantuan Hukum untuk periode 2022 – 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024 sebanyak 619 PBH dengan rincian akreditasi:

1. Akreditasi A : 14 PBH
2. Akreditasi B : 79 PBH
3. Akreditasi C : 526 PBH



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Program dan Kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2021 berdasarkan rencana strategis dan perjanjian kinerja, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran program dan kegiatan menunjukkan capaian sesuai bahkan melebihi target yang ditetapkan meskipun tidak menonjol. Capaian kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2021 secara keseluruhan dinyatakan berhasil, dengan melihat capaian rata-rata indikator kinerja utama. Meski banyak kendala dalam pencapaian target kinerja namun upaya untuk tetap menjaga kinerja terus dilakukan salah satunya melalui monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan tingkat wilayah. Selain itu kegiatan yang biasanya dilakukan melalui tatap muka diubah menjadi daring maupun *hybrid*. Perubahan anggaran melalui refocusing juga belum disertai dengan updateing perjanjian kinerja hingga revisi anggaran ke-15 sehingga menimbulkan masalah tersendiri dalam penyusunan laporan capaian kinerja yang berbasis pada perjanjian kinerja namun bisa disesuaikan dengan laporan realisasi anggaran dari aplikasi OMSPAN maupun SAS DJPB. Kedepannya perencanaan kinerja perlu dilakukan evaluasi dan pembaruan yang mengikuti perubahan kebijakan baik kebijakan anggaran maupun program. Selain itu adanya kebijakan pemblokiran anggaran pada tahun 2022 akan berimbas pada mekanisme kerja dan penetapan target pada indikator kinerja dalam rencana strategis BPHN. Namun demikian BPHN sudah menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi persoalan kebijakan pemblokiran anggaran sehingga kinerja kedepannya tetap dapat berjalan optimal dan target yang ditetapkan optimis dapat tetap tercapai.





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Juni 2021

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan (Kolaborasi bersama Direktorat jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Sesuai dengan Tusi BPHN)	3,1
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 70,0 77,0 79,0 76,61

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan 2. Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan	20 25
2	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 77 79 76,61

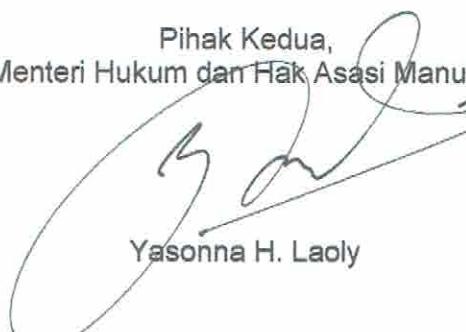
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20
		2. Dokumen pembangunan hukum nasional	1
		3. Persentase JF Analis Hukum yang memenuhi standar kompetensi	80
2.	Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis	1. Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan	25
		2. Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang	3
		3. Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan materi muatannya	7
3.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	66
4	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat	1. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20
		2. Indeks kepuasan layanan perpustakaan	76,61
		3. Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20
5	Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat	1. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70
		2. Persentase JF penyuluhan hukum yang memenuhi standar kompetensi	80
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61
6	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	77
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	79
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70
		5. Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan	20

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		portal/sistem integrasi JDIHN	
7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional 2. Jumlah Layanan Internal 3. Jumlah Layanan Perkantoran	1 1 1

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pembentukan Regulasi	Rp. 6.734.451.000,-
1.	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp. 1.892.967.000,-
2.	Perencanaan Hukum Nasional	Rp. 1.602.376.000,-
3.	Penyelenggaraan fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Rp. 3.239.108.000,-
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 71.376.884.000,-
1.	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp. 1.626.868.000,-
2.	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp. 2.894.929.000,-
3.	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 66.855.087.000,-
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 33.935.307.000,-
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp. 33.935.307.000,-

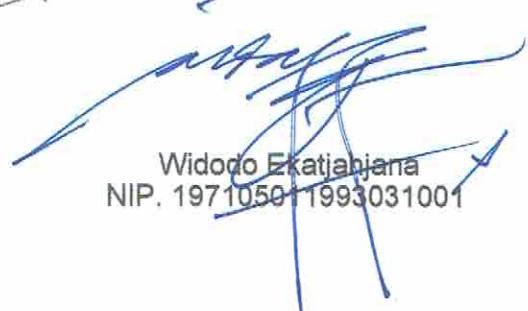
Jakarta, 24 Juni 2021

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatjahiana
NIP. 197105011993031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 24 Juni 2021

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Djoko Pudjiraharjo
Jabatan : Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Juli 2021

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Djoko Pudjiraharjo
NIP. 196209261989031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan (Kolaborasi bersama Direktorat jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Sesuai dengan Tusi BPHN)	3,1

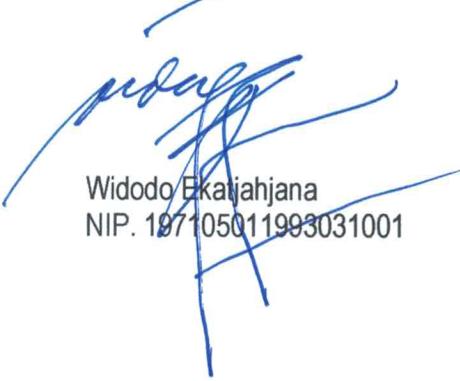
NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan	25

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis	1. Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan	25
		2. Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang	3
		3. Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan materi muatannya	7

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
Perencanaan Hukum Nasional		
1.	Rekomendasi Prolegnas	Rp. 710.858.000,-
2.	Rekomendasi Naskah Akademik RUU	Rp. 466.518.000,-
3.	Rekomendasi Penyelarasan Naskah Akademik	Rp. 425.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 1.602.376.000,-

Jakarta, 25 Juli 2021

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Eka Ijahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional



Djoko Pudjiraharjo
NIP. 196209261989031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kartiko Nurintias
Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Juli 2021

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

Widodo Ekatjahjana
NIP. 1971050119930310013

Kartiko Nurintias
NIP. 196308161983031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1.	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70,0	
		2.	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77,0	
		3.	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79,0	
		4.	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM		TARGET	
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1.	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77	
		2.	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79	
		3.	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	

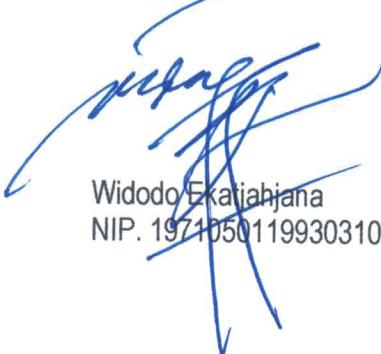
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat	1.	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70	
		2.	Persentase JF penyuluhan hukum yang memenuhi standar kompetensi	80	
		3.	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum		
1.	Akreditasi Lembaga: - Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Periode 2022 s.d 2024	Rp. 865.632.000,-
2.	Standarisasi Profesi dan SDM: - Layanan Pembinaan Penyuluhan Hukum Nasional	Rp. 517.953.000,-
3.	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat: - Fasilitasi Kelompok Desa Sadar Hukum - Layanan Penyuluhan Hukum	Rp. 628.139.000,-
4.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga: - Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Provinsi	Rp. 386.493.000,-
JUMLAH		Rp. 2.398.217.000,-

Jakarta, 25 Juli 2021

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum



Widodo Ekajahjana
NIP. 1971050119930310013



Kartiko Nurintias
NIP. 196308161983031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yasmon
Jabatan : Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

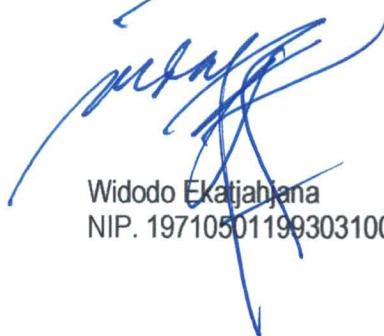
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Juli 2021

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan
Informasi Hukum Nasional


Yasmon
NIP. 196805201994031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET	
			(1)	(2)
1.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	TARGET	
			(1)	(2)
1.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			(1)	(2)
1.	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat	1. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif 2. Indeks kepuasan layanan perpustakaan 3. Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20	
			76,61	
			20	

NO.	KEGIATAN		ANGGARAN	
Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional				
1.	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga: - Fasilitasi Integrasi JDIHN		Rp. 1.365.163.000,-	
2.	Data dan Informasi Publik: - Layanan Perpustakaan Hukum		Rp. 261.705.000,-	
JUMLAH			Rp. 1.626.868.000,-	

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatahjana
NIP. 197105011993031001

Jakarta, 25 Juli 2021
Pihak Pertama,
Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan
Informasi Hukum Nasional

Yasmin
NIP. 196805201994031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Audy Murfi M.Z
Jabatan : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

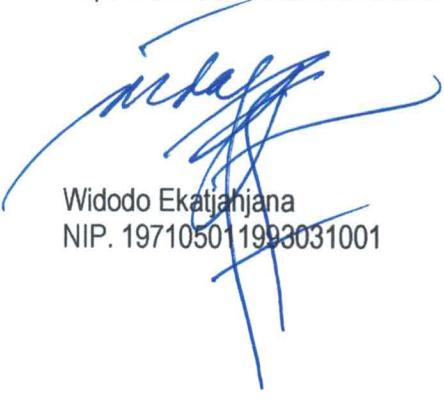
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Juli 2021

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak Pertama,
Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional


Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001


Audy Murfi M.Z
NIP. 196303271989031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

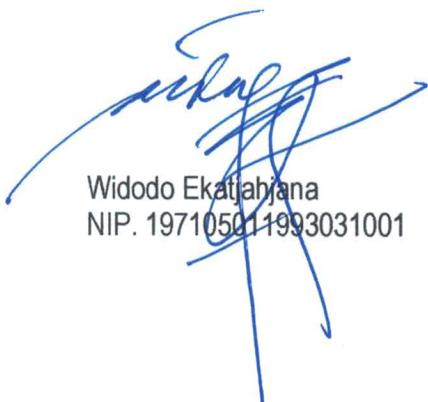
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	1
		2. Jumlah Layanan Internal	1
		3. Jumlah Layanan Perkantoran	1

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN		
1.	Layanan Perkantoran	Rp. 27.133.710.000,-
2.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Rp. 538.793.000,-
3.	Layanan Umum	Rp. 328.600.000,-
4.	Layanan Sarana Internal	Rp. 3.315.584.000,-
5.	Layanan SDM	Rp. 416.124.000,-
6.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp. 263.870.000,-
7.	Layanan Kehumasan dan Protokoler	Rp. 752.723.000,-
8.	Layanan Data dan Informasi	Rp. 252.548.000,-
9.	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Rp. 233.823.000,-
JUMLAH		Rp. 33.235.775.000,-

Jakarta, 25 Juli 2021

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

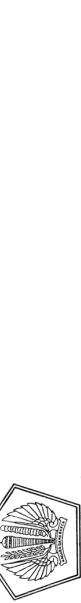
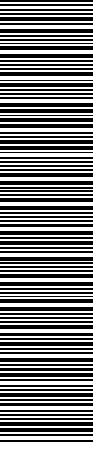
Pihak Pertama,
Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatjahana
NIP. 197105011993031001



Audy Murfi M.Z.
NIP. 196303271989031001



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : SP DIPA- 013.10.1.409288/2020

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Peribendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : | (10) | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL |
| 3. Provinsi | : | (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode/Nama Satker | : | (409288) | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL |
| Sebesar | : | Rp. 42.721.171.000 | (EMPAT PULUH DUA MILIAR TUJUH RATUS DUA PULUH SATU JUTA SERATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------|
| 1. Rupiah Murni | Rp. 42.721.171.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. 0 |
| 2. PNBP | | -Pinjaman Dalam Negeri | Rp. 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. 0 | -Hibah Dalam Negeri | Rp. 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. 0 |
| -Pinjaman Luar Negeri | Rp. 0 | -Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. 0 |
| D. Pencatian dana dilakukan melalui : | | 6. SBSN PBS | Rp. 0 |
| 1. KPRN JAKARTA V | (139) Rp. 42.721.171.000 | | |

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan bertfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencatian dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraaan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

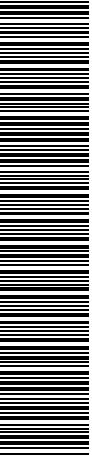
ttd.

ASKOLANI
NIP. 19660611199201001

LAMPIRAN**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020****NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2020**

Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

12	Program Pembinaan Hukum Nasional	Rp. 42.721.171.000
12.1610	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp. 1.749.425.000
12.1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp. 2.289.900.000
12.1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp. 2.895.500.000
12.1613	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	Rp. 1.702.509.000
12.1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp. 34.083.837.000



DS:4726-6626-6670-3569

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2020

I A. INFORMASI KINERJA

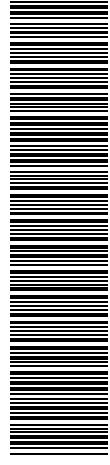
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kuasa Pengguna Anggaran : Audi Murfi MZ, S.H, M.H.
Bendahara Pengeluaran : Lianawati Rahayu, S.H.
Pejabat Penanda Tangan SPM : Tuyono, S.H.

DS:4726-6626-6670-3569

1	Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Halaman : I.A. 1
	Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM	42.721.171.000
2	Program	013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional	42.721.171.000
	Hasil (Outcome)	01	Terwujudnya Pembinaan Hukum	42.721.171.000
	IKU Program	01	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	
		02	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan aran Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	
		03	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	
		04	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	
		05	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	
	Kegiatan	1610	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	1.749.425.000
	Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah anggota Jaringan Hukum yang terintegrasi secara online dalam Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional	
		02	Data Hukum Yang Dikelola Dan Terintegrasi Dalam Database Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional	
	Keluaran (Output)	1610.001	Sasaran Anggota JDIH N	25,00 Anggota
		1610.002	Jumlah Layanan Pemustaka Offline dan Online	100,00 Dokumen
	Kegiatan	1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	2.289.900.000
	Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Sebagai Bahan Kebijakan dan Pembangunan	
		02	Tersusunnya Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	
	Keluaran (Output)	1611.001	Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	12,00 Rekomendasi
		1611.002	Penyusunan SOP Mengenai Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum	1,00 Dokumen
	Kegiatan	1611.005	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	1,00 Dokumen
	Indikator Kinerja Kegiatan	1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	450.000.000
		01	Jumlah Desa/Kelurahan sadar hukum yang terbentuk di setiap wilayah	2.895.500.000
	Keluaran (Output)	02	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah	
		03	Jumlah JFT Penyuluhan Hukum yang terbentuk	
	Kegiatan	04		
	Indikator Kinerja Kegiatan			

Halaman : I.A. 1



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2020

I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kuasa Pengguna Anggaran : Audi Murfi MZ, S.H., M.H.
Bendahara Pengeluaran : Lianawati Rahayu, S.H.
Pejabat Penanda Tangan SPM : Tuyono, S.H.

DS:4726-6626-6670-3569

Indikator Kinerja Kegiatan	05	Jumlah Media Penyuluhan dan Bantuan Hukum yang terbentuk	
Keluaran (Output)	06	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum	
	1612.001	Desa Sadar hukum	175,00 Desa/Kelurahan
	1612.002	Layanan Penyuluhan Hukum	150,00 Kegiatan
	1612.003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah	33,00 Kantor Wilayah
Kegiatan	1612.004	Penyuluh Hukum Nasional	50,00 Penyuluh
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	
	1613	Tersusunnya Dokumen Program legislasi dan terlaksananya fasilitas program legislasi daerah/program pembentukan peraturan daerah	
	02	Jumlah Naskah Akademik RUU Yang Dhasilkan	
	03	Jumlah Naskah Akademik RUU Yang Diselaraskan	
Keluaran (Output)	04	Dokumen Program Legislasi	
	1613.001	Naskah Akademik RUU	3,00 Dokumen
	1613.002	Naskah Akademik RUU	3,00 Naskah Akademik
	1613.003	Penyebarluasan Naskah Akademik	15,00 Penyebarluasan
	1613.004	Penyeusunan Naskah Akademik RUU Badan Usaha	1,00 Naskah Akademik
Kegiatan	1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	34.083.837.000
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu	
	02	Terselegggaranya layanan keuangan yang akuntabel dan transparan	
	03	Terselegggaranya layanan data dan informasi BPHN	
	04	Terselegggaranya reformasi birokrasi BPHN dan SPIP	
	05	Terselegggaranya pembinaan dan pengembangan apparatur BPHN dengan didukung administrasi yang akuntabel dan tepat waktu	
	06	Terbangunnya citra positif BPHN administrasi kerjasama dan terselegggaranya sistem penatausahaan dan kearsipan BPHN	
	07	Terselegggaranya pengelolaan BMN yang akuntabel dan transparan	
	08	tersediannya dukungan satuan dan prasarana/gedung/bangunan	
Keluaran (Output)	09	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1,00 Layanan
	1614.950	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00 Layanan
	1614.951		

Halaman : I A. 2

1.153.893.000

237.195.000

754.185.000

750.227.000

1.702.509.000

680.568.000

391.941.000

480.000.000

150.000.000

34.083.837.000

2.940.590.000

6.387.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2020
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

1614.994 Layanan Perkantoran

1,00 Layanan

24.756.247.000

Kuasa Pengguna Anggaran : Audi Murfi MZ, S.H., M.H.
Bendahara Pengeluaran : Lianawati Rahayu, S.H.
Pejabat Penanda Tangan SPM : Tuyono, S.H.

Halaman : I.A. 3

DS:4726-6626-6670-3569

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.

Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2020

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (013)
Unit Organisasi : (10)
Provinsi : (01)
Kode/Nama Satker : (409288)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DKI JAKARTA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Halaman : I B. 1

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING	
	1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Langsung 5. Hibah PBS 6. SBSN PBS 2. Rincian Pinjaman / Hibah :		Rp. 42.721.171.000 Rp. 42.721.171.000 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0	Ket: a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing (2) RPLN b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing (2) RHLN c. Pinjaman Dalam Negeri d. Hibah Dalam Negeri e. Hibah Luar Negeri Langsung f. Hibah Dalam Negeri Langsung	US\$ 0 US\$ 0 US\$ 0 US\$ 0 US\$ 0 US\$ 0	Pagu Ekivalen Rupiah 0 0 0 0 0 0	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	0 0 0 0 0 0
1	2	3	4	5	6	7	8	9



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

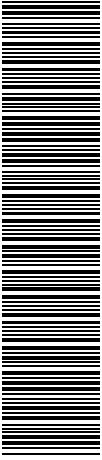
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2020

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA					LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER	
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409288	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	15.680.453	20.379.718	6.661.000	-	-	-	42.721.171	
013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional	15.680.453	20.379.718	6.661.000	-	-	-	42.721.171	
1610	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	-	1.689.425	60.000	-	-	-	1.749.425	
1610.001	Sasaran Anggota, IDH/HN	-	1.153.315	50.000	-	-	-	1.203.315	01. 00
01	RM	-	1.153.315	50.000	-	-	-	1.203.315	139
1610.002	Jumlah Layanan Pemustaka Offline dan Online	-	536.110	10.000	-	-	-	546.110	01. 00
01	RM	-	536.110	10.000	-	-	-	546.110	139
1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	-	2.289.900	-	-	-	-	2.289.900	
1611.001	Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	-	1.718.390	-	-	-	-	1.718.390	01. 00
01	RM	-	1.718.390	-	-	-	-	1.718.390	139
1611.002	Penyusunan SOP Mengenai Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum	-	121.510	-	-	-	-	121.510	01. 00
01	RM	-	121.510	-	-	-	-	121.510	139
1611.005	Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	-	450.000	-	-	-	-	450.000	01. 00
01	RM	-	450.000	-	-	-	-	450.000	139



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

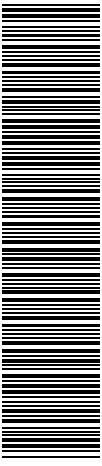
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2020

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1612 Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	-	2.681.500	214.000	-	-	-	2.895.500		
1612.001 Desa Sadar hukum	-	1.138.893	15.000	-	-	-	1.153.893	01.00	
01 RM	-	1.138.893	15.000	-	-	-	1.153.893	139	
1612.002 Layanan Penyuluhan Hukum	-	237.195	-	-	-	-	237.195	01.00	
01 RM	-	237.195	-	-	-	-	237.195	139	
1612.003 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah	-	555.185	199.000	-	-	-	754.185	01.00	
01 RM	-	555.185	199.000	-	-	-	754.185	139	
1612.004 Penyuluhan Hukum Nasional	-	750.227	-	-	-	-	750.227	01.00	
01 RM	-	750.227	-	-	-	-	750.227	139	
1613 Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	-	1.702.509	-	-	-	-	1.702.509		
1613.001 Dokumen Program Legislasi	-	680.568	-	-	-	-	680.568	01.00	
01 RM	-	680.568	-	-	-	-	680.568	139	
1613.002 Naskah Akademik RUU	-	391.941	-	-	-	-	391.941	01.00	
01 RM	-	391.941	-	-	-	-	391.941	139	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2020

II. RINCIAN PENGELUARAN

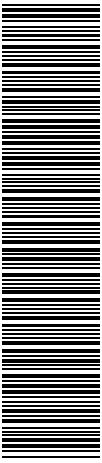
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1613.003	Penyelarasan Naskah Akademik	-	480.000	-	-	-	-	480.000	01. 00
01	RM	-	480.000	-	-	-	-	480.000	139
1613.004	Penyusunan Naskah Akademik RUU Badan Usaha	-	150.000	-	-	-	-	150.000	01. 00
01	RM	-	150.000	-	-	-	-	150.000	139
1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	15.680.453	12.016.384	6.387.000	-	-	34.083.837		
1614.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	-	2.940.590	-	-	-	-	2.940.590	01. 00
01	RM	-	2.940.590	-	-	-	-	2.940.590	139
1614.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	6.387.000	-	-	-	-	6.387.000	01. 00
01	RM	-	6.387.000	-	-	-	-	6.387.000	139@
1614.994	Layanan Perkantoran	15.680.453	9.075.794	-	-	-	-	24.756.247	01. 00
01	RM	15.680.453	9.075.794	-	-	-	-	24.756.247	139
	JUMLAH	15.680.453	20.379.718	6.661.000	-	-	42.721.171		

Jakarta, 12 November 2019
 Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
 NIP 196204101987031003

ttd.

Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
 NIP 196204101987031003



DS:4726-6626-6670-3569

Halaman : II. 3
 (dalam ribuan rupiah)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2020

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Halaman : III, 1
(dalam ribuan rupiah)

DS:4726-6626-6670-3369

Kode/Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN									JUMLAH SELURUH		
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	409288	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL											16	
		RENCANA PENARIKAN DANA												
51	BELANJA PEGAWAI	1.011.594	1.191.617	2.250.768	5.322.747	6.977.275	6.050.365	5.057.769	3.403.267	2.473.343	2.947.905	2.303.510	2.362.920	
52	BELANJA BARANG	387.593	1.059.151	3.485.619	1.178.023	2.188.714	2.127.283	1.146.366	1.152.008	1.145.649	1.094.759	1.077.076	1.187.909	
53	BELANJA MODAL	0	0	657.583	2.359.000	2.585.417	1.276.234	1.921.476	2.256.901	1.321.335	1.752.256	1.208.751	1.285.844	
013.10.12.1610	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	0	34.578	279.284	141.298	125.232	209.694	495.956	89.411	0	50.000	0	0	
52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	34.578	279.284	141.298	125.232	199.694	495.956	89.411	104.896	104.896	37.921	151.139	30.016	
53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
013.10.12.1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	0	80.680	380.340	445.803	216.309	156.725	226.517	288.451	167.154	88.251	158.930	80.740	
52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	80.680	380.340	445.803	216.309	156.725	226.517	288.451	167.154	88.251	158.930	80.740	2289.900	
013.10.12.1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	40.802	105.491	128.961	1.445.970	129.131	466.697	199.458	83.195	88.249	106.559	96.734	4.253	
52 BELANJA BARANG DAN BARANG	40.802	105.491	128.961	1.430.970	129.131	267.697	199.458	83.195	88.249	106.559	96.734	4.253	2.895.500	
53 BELANJA MODAL	0	0	0	15.000	0	199.000	0	0	0	0	0	0	214.000	
013.10.12.1613	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	27.155	92.185	188.013	341.908	89.386	107.738	159.768	78.011	237.182	119.252	202.519	59.392	
52 BELANJA BARANG DAN BARANG	27.155	92.185	188.013	341.908	89.386	107.738	159.768	78.011	237.182	119.252	202.519	59.392	2.681.500	
013.10.12.1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	1.331.230	1.937.834	4.346.149	4.602.296	5.490.307	4.116.915	2.321.568	1.934.275	2.300.424	1.951.527	1.753.598	1.997.714	34.083.837
51 BELANJA PEGAWAI	1.011.594	1.191.617	1.179.545	1.178.023	2.188.714	2.127.283	1.146.366	1.152.008	1.145.649	1.094.759	1.077.076	1.187.809	1.187.809	15.680.453
52 BELANJA BARANG DAN BARANG	319.636	746.217	2.509.021	1.080.273	716.176	1.189.622	1.175.202	782.267	1.154.775	856.768	676.522	809.905	12.161.384	12.161.384
53 BELANJA MODAL	0	0	657.583	2.344.000	2.585.417	800.000	0	0	0	0	0	0	0	6.387.000

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttt.

Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2020
IV. C A T A T A N

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : [10] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Provinsi : [01] DKI JAKARTA
 Kode dan Nama Satker : [409288] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Halaman : IV.1
 (dalam ribuan rupiah)

DS:4726-6626-6670-3569

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
409288	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan 53 Belanja Modal	Rp.	2.784.917 Rp. 2.784.917
013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional		
1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN		
1614.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM) Pengadaan kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 1 unit dan roda 2 sebanyak 10 unit 532111 Catatan Belanja Penambahan Nila Gedung dan Bangunan(RM) 533121 Catatan Renovasi gedung bangunan seluas 747 m2 Tidak Dapat Dicairkan Perlu dilampiri data dukung terkait	Rp.	2.784.917
	Disposisi:		Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasianya dan/atau dokumen terkait

Jakarta, 12 November 2019
 Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
 Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
 NIP 196204101987031003



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 013.10.1.409288/2021

DS-9406-4655-0031-2212

Revisi ke 15

Tanggal : 08 Desember 2021

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Peribendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : | (10) | Badan Pembinaan Hukum Nasional |
| 3. Provinsi | : | (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode/Nama Satker | : | (409288) | BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL |
| Sebesar | : | Rp. 39.340.750.000 | (TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA RATUS EMPAT PULUH JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------|
| 1. Rupiah Murni | Rp. 39.340.750.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. 0 |
| 2. PNBP | | -Pinjaman Dalam Negeri | Rp. 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. 0 | -Hibah Dalam Negeri | Rp. 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. 0 |
| -Pinjaman Luar Negeri | Rp. 0 | -Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. 0 |
| D. Pencatian dana dilakukan melalui : | | 6. SBSN PBS | Rp. 0 |
| 1. KPRN JAKARTA V | (139) Rp. 39.340.750.000 | | |

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan bertfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencatian dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraaan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.

ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021****NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021**

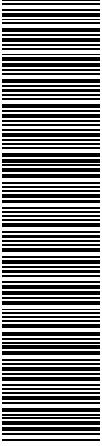
Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp. 3.313.569.000
BB.1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp. 1.795.740.000
BB.1613	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	Rp. 1.517.829.000
BF	Program Penegakan dan Pelaksanaan Hukum	Rp. 3.953.220.000
BF.1610	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp. 1.555.003.000
BF.1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp. 2.398.217.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 32.073.961.000
WA.1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp. 32.073.961.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**TAHUN ANGGARAN 2021****NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021****I A. INFORMASI KINERJA**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Klasifikasi Rincian Output	Kegiatan	Rincian Output	Klasifikasi Rincian Output	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Program
											Halaman : I.A. 1
											3.313.569.000
											1.795.740.000
											1.381.908.000
											413.832.000
											1.517.829.000
											3.953.220.000
											1.555.003.000



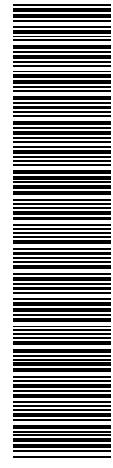
DS-9406-4855-0031-2212

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**TAHUN ANGGARAN 2021****NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021****I A. INFORMASI KINERJA**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Klasifikasi Rincian Output					1	1610.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	163,00	Lembaga	1.333.663.000
Rincian Output	:	01	BDB.001	Fasilitas Integrasi JDIHN				163,00	Lembaga	1.333.663.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	1610.BMA	Data dan Informasi Publik				3,00	layanan	221.340.000
Rincian Output	:	01	BMA.001	Layanan Perpustakaan Hukum				3,00	layanan	221.340.000
Kegiatan	:	1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum					2.398.217.000		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase desakelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah							
		2. 02	Persentase JF penyuluhan hukum yang memenuhi standar kompetensi							
		3. 03	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum							
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1612.ADE	Akkreditasi Lembaga				524,00	Lembaga	865.632.000
Rincian Output	:	01	ADE.001	Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2022 s.d. 2024				524,00	Lembaga	865.632.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	1612.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM				517.953.000		
Rincian Output	:	01	ADG.001	Layanan Pembinaan Penyuluhan Hukum Nasional				517.953.000		
Klasifikasi Rincian Output	5	:	1612.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				380,00	Kelompok Masyarakat	628.139.000
Rincian Output	:	01	BDD.001	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar Hukum				315,00	Kelompok Masyarakat	437.112.000
	02	BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum					65,00	Kelompok Masyarakat	191.027.000

Halaman : I A. 2

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**TAHUN ANGGARAN 2021****NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021****I A. INFORMASI KINERJA**

DS-9406-4855-0031-2212

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

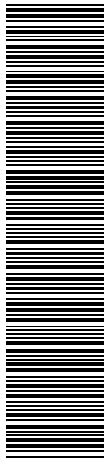
Halaman : I.A. 3					
Klasifikasi Rincian Output	6	:	1612.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	557,00 Lembaga
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Provinsi	557,00 Lembaga
Program	:	013.10.WA	Program Dukungan Manajemen	32.073.961.000	
Kegiatan	:	1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	32.073.961.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	1614.EAA	Layanan Perkantoran	1,00 Layanan
Rincian Output	:	01	EAA.994	Layanan Perkantoran	1,00 Layanan
Klasifikasi Rincian Output	2	:	1614.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2,00 Layanan
Rincian Output	:	01	EAB.001	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00 Layanan
	02		EAB.002	Manajemen Keuangan	1,00 Layanan
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1614.EAC	Layanan Umum	1,00 Layanan
Rincian Output	:	01	EAC.001	Layanan Umum	1,00 Layanan
Klasifikasi Rincian Output	4	:	1614.EAD	Layanan Sarana Internal	103,00 unit
Rincian Output	:	01	EAD.951	Layanan Sarana Internal	103,00 unit
Klasifikasi Rincian Output	5	:	1614.EAF	Layanan SDM	232,00 orang
Rincian Output	:	01	EAF.001	Layanan SDM	232,00 orang

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021
I.A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Layanan SDM				
orang				
Klasifikasi Rincian Output 6	:	1614.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00 Layanan
Rincian Output	:	01 EAH.001	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00 Layanan
Klasifikasi Rincian Output 7	:	1614.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1,00 Layanan
Rincian Output	:	01 EAI.001	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1,00 Layanan
Klasifikasi Rincian Output 8	:	1614.EAJ	Layanan Data dan Informasi	1,00 Layanan
Rincian Output	:	01 EAJ.001	Layanan Data dan Informasi	1,00 Layanan
Klasifikasi Rincian Output 9	:	1614.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1,00 Laporan
Rincian Output	:	01 EAL.001	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1,00 Laporan

Halaman : I.A. 4



DS-9406-4855-0031-2212

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.

Prof. Dr. Widodo Ekatjahana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

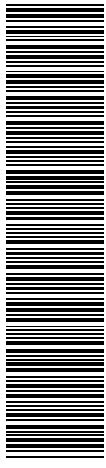
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**TAHUN ANGGARAN 2021****NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021****I B. SUMBER DANA**

Kementerian Negara/Lembaga : (013)
 Unit Organisasi : (10)
 Provinsi : (01)
 Kode/Nama Satker : (409288)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Badan Pembinaan Hukum Nasional
 DKI JAKARTA
 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Halaman : IB. 1

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING	
	1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		1) Mata Uang NPP/H 2) Ekivalen USD 3) Ekivalen Rupiah 4) LC 5) -		1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -			
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

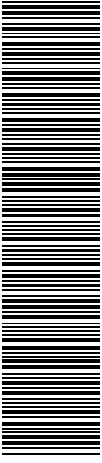
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (01.3) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA					LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER	
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409288	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	17.322.442	19.742.724	2.275.584	-	-	39.340.750	-	-
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	3.313.569	-	-	-	3.313.569	-	-
1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	-	1.795.740	-	-	-	1.795.740	-	-
1611.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	1.795.740	-	-	-	1.795.740	01.99	01.99
01	RM	-	1.795.740	-	-	-	1.795.740	139	139
1613	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	-	1.517.829	-	-	-	1.517.829	01.99	01.99
1613.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	1.517.829	-	-	-	1.517.829	01.99	01.99
01	RM	-	1.517.829	-	-	-	1.517.829	139	139
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	3.903.220	50.000	-	-	3.903.220	-	-
1610	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	-	1.505.003	50.000	-	-	1.555.003	-	-
1610.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	1.333.663	-	-	-	1.333.663	01.99	01.99



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

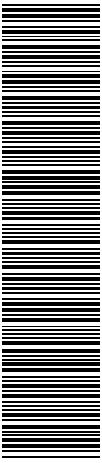
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (01.3) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA					LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER	
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM	1610.BMA Data dan Informasi Publik (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	1.333.663	-	-	-	1.333.663	139	
01 RM	1612 Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	-	171.340	50.000	-	-	221.340	01.99	
1612.ADE Akreditasi Lembaga (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)		-	171.340	50.000	-	-	221.340	139	
01 RM	1612.ADG Standarisasi Profesi dan SDM (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	2.398.217	-	-	-	2.398.217	01.99	
1612.BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)		-	865.632	-	-	-	865.632	139	
01 RM	1612.BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	517.953	-	-	-	517.953	01.99	
01 RM	1612.BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	517.953	-	-	-	517.953	139	
01 RM	1612.BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	628.139	-	-	-	628.139	01.99	
01 RM		-	628.139	-	-	-	628.139	139	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

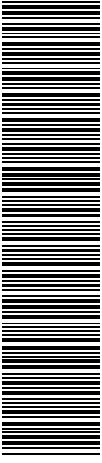
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (01.3) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA					LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER	
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1612.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	386.493	-	-	-	-	386.493	01.99
01 RM		-	386.493	-	-	-	-	386.493	139
013.10.WA	Program Dukungan Manajemen	17.322.442	12.525.935	2.225.584	-	-	-	32.073.961	
1614.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	17.322.442	12.525.935	2.225.584	-	-	-	32.073.961	
1614.EAA	Layanan Perkantoran (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	17.322.442	10.311.268	-	-	-	-	27.633.710	01.99
01 RM		17.322.442	10.311.268	-	-	-	-	27.633.710	139
1614.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	426.717	-	-	-	-	426.717	01.99
01 RM		-	426.717	-	-	-	-	426.717	139
1614.EAC	Layanan Umum (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	279.572	-	-	-	-	279.572	01.99
01 RM		-	279.572	-	-	-	-	279.572	139



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

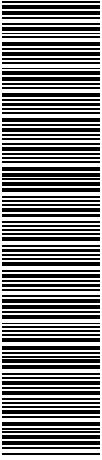
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (01.3) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA					LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER	
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1614.EAD	Layanan Sarana Internal (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	-	2.225.584	-	-	2.225.584	01.99	
01	RM	-	-	2.225.584	-	-	2.225.584	139	
1614.EAF	Layanan SDM (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	-	356.124	-	-	356.124	01.99	
01	RM	-	-	356.124	-	-	356.124	139	
1614.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	-	198.964	-	-	198.964	01.99	
01	RM	-	-	198.964	-	-	198.964	139	
1614.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	-	612.097	-	-	612.097	01.99	
01	RM	-	-	612.097	-	-	612.097	139	
1614.EAJ	Layanan Data dan Informasi (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	-	191.148	-	-	191.148	01.99	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (01.3) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode/Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	191.148	-	-	-	191.148	139	
1614.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (01.99 DKI JAKARTA / INSTANSI PUSAT)	-	150.045	-	-	-	150.045	01.99	
01 RM		-	150.045	-	-	-	150.045	139	
JUMLAH	17.322.442	19.742.724		2.275.564			-	-	39.340.750

Halaman : II. 5
 (dalam ribuan rupiah)

DS-9406-4855-0031-2212

ttd.

Jakarta, 17 November 2021

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. Dr. Widodo Ekatjahana, S.H., M.Hum
 NIP 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

DS-9406-4855-0031-2212

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN									JUMLAH SELURUH		
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OCTOBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	409288	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL											16	
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.113.764	3.149.168	2.450.025	3.142.510	4.148.582	3.487.423	2.333.744	2.503.565	3.176.408	4.205.348	3.970.083	
		BELANJA PEGAWAI	1.028.007	1.302.705	1.243.148	1.256.486	2.356.173	2.302.333	1.218.320	1.237.696	1.215.814	1.218.551	1.203.503	
		BELANJA BARANG	85.756	1.846.464	1.163.877	1.852.477	1.749.878	1.185.090	1.009.565	1.115.916	1.267.430	2.482.547	2.130.137	
		BELANJA MODAL	0	0	43.000	33.547	42.531	0	105.259	149.952	693.164	504.250	636.443	
013.10.BB.1611		Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	84	214.714	40.200	121.439	119.650	99.239	119.314	152.269	97.964	155.444	530.100	
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	84	214.714	40.200	121.439	119.650	99.239	119.314	152.269	97.964	155.444	530.100	
013.10.BB.1613		Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	2.013	125.351	171.942	146.042	199.289	43.014	81.194	61.924	90.536	309.199	149.580	
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.013	125.351	171.942	146.042	199.289	43.014	81.194	61.924	90.536	309.199	149.580	
013.10.BF.1610		Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	2.331	422.766	86.178	47.156	56.709	131.812	140.009	98.961	54.346	165.254	224.304	
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.331	422.766	86.178	40.121	55.526	131.812	140.009	88.553	51.520	154.779	207.556	
013.10.BF.1612		Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	7.277	102.730	73.414	239.505	32.150	0	1.184	0	1.048	2.826	10.475	
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	7.277	102.730	73.414	239.505	32.150	0	1.184	0	1.048	2.826	10.475	
013.10.WA.1614		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	1.102.059	2.283.607	2.078.291	2.588.369	3.740.784	2.992.398	1.886.543	1.728.838	2.595.373	3.325.389	2.659.057	5.091.252

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**TAHUN ANGGARAN 2021****NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021****III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

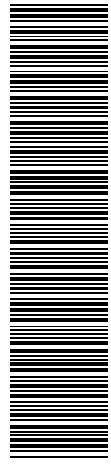
NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN									JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16
		51 BELANJA PEGAWAI	1.028.007	1.302.705	1.243.148	1.256.486	2.356.173	2.302.333	1.218.520	1.237.686	1.215.814	1.218.551
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	74.051	980.903	792.144	1.305.370	1.343.264	690.065	564.364	351.598	689.221	1.613.063
		53 BELANJA MODAL	0	0	43.000	26.513	41.348	0	105.259	139.545	690.338	493.775
		PERKIRAAN PENERIMAAN	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
		- PNBP (425131)	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
												20.000

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)
Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.

Prof. Dr. Widodo Ektajahana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021
IV A. B L O K I R



DS-9406-4855-0031-2212

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409288] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

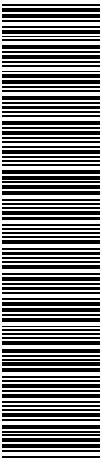
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.10.1.409288/2021
IV B. C A T A T A N



DS-9406-4855-0031-2212

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Provinsi : [01] DKI JAKARTA
 Kode dan Nama Satker : [409288] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Halaman : IV.B. 1
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
409288	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL		
013.10.WA	Program Dukungan Manajemen		
1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN		
1614.EAD	Layanan Sarana Internal	Rp.	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	* Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 sebanyak 1 Unit	Rp.	
532111		510.000	
			510.000

Jakarta, 17 November 2021
 Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
 Prof. Dr. Widodo Ekatjahana, S.H., M.Hum
 NIP 197105011993031001

**Realisasi Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional
Tahun 2021**

Program Pembentukan Regulasi

1. Pusat Perencanaan Hukum Nasional

- Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis

	KEGIATAN	PAGU	SERAPAN	% realisasi
1.	Rekomendasi Prolegnas	Rp678.605.000,-	Rp671.558.791	98,96
2.	Rekomendasi Naskah Akademik RUU	Rp446.418.000,-	Rp445.880.002	99,87
3.	Rekomendasi Penyelarasan Naskah Akademik	Rp392.806.000,-	Rp392.243.750	99,85
JUMLAH		Rp. 1.517.829.000,-	Rp1.509.682.543	99,46

(Data SAS Per 31 Desember 2021)

2. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

- Meningkatnya kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum

NO.	KEGIATAN	PAGU	SERAPAN	% realisasi
1	Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	1.381.908.000	1.351.848.000	97,82
2	Rekomendasi Pembangunan Hukum Nasional	413.832.000	391.651.835	94,64
Jumlah		1.795.740.000	1.743.499.835	97,27

(Data SAS Per 31 Desember 2021)

Program Pelayanan dan Penegakan Hukum

1. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
 - Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat

NO.	KEGIATAN	PAGU	SERAPAN	% realisasi
1	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga: - Fasilitasi Integrasi JDHN	1.333.663.000	1.326.913.299	98,29
2	Data dan Informasi Publik: - Layanan Perpustakaan Hukum	221.340.000	220.941.957	98,45
	Jumlah	1.555.003.000	1.547.855.256	99,54

(Data SAS Per 31 Desember 2021)

2. Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

- Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat

NO.	KEGIATAN	PAGU	SERAPAN	% realisasi
1.	Akreditasi Lembaga: - Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Periode 2022 s.d 2024	865.632.000	856.148.615	98,67
2.	Standarisasi Profesi dan SDM: - Layanan Pembinaan Penyuluhan Hukum Nasional	517.953.000	500.985.420	99,37
3.	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat: - Fasilitasi Kelompok Desa Sadar Hukum - Layanan Penyuluhan Hukum	628.139.000	621.928.765	96,72
4.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga: - Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Provinsi	386.493.000	385.903.441	99,84
	Jumlah	2.398.217.000	2.364.966.241	98,61

(Data SAS Per 31 Desember 2021)

**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya BPHN**

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

- Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional

NO.	KEGIATAN	PAGU	SERAPAN	% realisasi
1	Layanan Perkantoran	27.633.710.000	27.196.679.408	98,41
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	426.717.000	395.467.205	92,67
3	Layanan Umum	279.572.000	273.616.000	97,86
4	Layanan Sarana Internal	2.225.584.000	2.214.472.930	99,50
5	Layanan Prasarana Internal	Refocusing		
6	Layanan SDM	356.124.000	346.846.670	97,39
7	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	198.964.000	182.962.700	91,95
8	Layanan Kehumasan dan Protokoler	612.097.000	581.173.277	94,94
9	Layanan Data dan Informasi	191.148.000	185.266.000	96,92
10	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	150.045.000	138.397.850	92,23
Jumlah		32.073.961.000	31.514.882.040	98,25

(Data SAS Per 31 Desember 2021)

**DAFTAR RUU PROLEGNAS PRORITAS TAHUN 2022
PRAKARSA PEMERINTAH**

No	JUDUL RUU
1	RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
2	RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
3	RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
4	RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
5	RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PERDATA
6	RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
7	RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA
8	RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1973 TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA (RUU TENTANG LANDAS KONTINEN)
9	RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH (RUU TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH)
10	RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG WABAH
11	RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PEMBINAAN IDIOLOGI PANCASILA
12	RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG DESAIN INDUSTRI

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : /DPR RI/I/2021-2022
TANGGAL : 7 Desember 2021**

**DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2020-2024**

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR	
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR	
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut	DPR	
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan	DPR	
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Tugas Perbantuan Militer	DPR	
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	DPR	
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Paradiplomasi	DPR	
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertahanan	DPR	
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR	

Paraf 1	Paraf 2
1	1

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD	DPR	
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	DPR	
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Penjabat Pembuat Akta Tanah	DPR	
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	DPR	
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria	DPR	
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	DPR	
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	DPR	
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Terpadu Mandiri	DPR	
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	DPR	
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR	
21.	Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan	DPR	

Paraf 1	Paraf 2
{	}

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
22.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR	
23.	Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim	DPR	
24.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR	
25.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	DPR	
26.	Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan	DPR	
27.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	DPR	
28.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	DPR	
29.	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum	DPR	
30.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR	
31.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	DPR	
32.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun	DPR	

Paraf 1	Paraf 2
<u>m</u>	{}

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi		
33.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	DPR	
34.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	DPR	
35.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materiil Perkawinan	DPR	
36.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	DPR	
37.	Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan	DPR	
38.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	DPR	
39.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	DPR	
40.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR	
41.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan	DPR	
42.	Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	DPR	

Paraf 1	Paraf 2
	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
43.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan	DPR	
44.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan	DPR	
45.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DPR	
46.	Rancangan Undang-Undang tentang Perkelapasarwitan	DPR	
47.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR	
48.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR	
49.	Rancangan Undang-Undang tentang Transportasi Daring	DPR	
50.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Transportasi Nasional	DPR	
51.	Rancangan Undang-Undang tentang Sanitasi	DPR	
52.	Rancangan Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan	DPR	
53.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPR	

Paraf 1	Paraf 2
	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
54.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR	
55.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	DPR	
56.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	DPR	RUU Carry Over
57.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemanfaatan Tenaga Surya	DPR	
58.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR	
59.	Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup	DPR	
60.	Rancangan Undang-Undang tentang Kendaraan Listrik	DPR	
61.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial	DPR	
62.	Rancangan Undang-Undang tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial	DPR	
63.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama	DPR	
64.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	DPR	

Paraf 1	Paraf 2
m	1

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
65.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	DPR	
66.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR/PEMERINTAH	
67.	Rancangan Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	DPR	
68.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perindustrian Nasional	DPR	
69.	Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional	DPR	
70.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR	
71.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar oleh Negara	DPR	
72.	Rancangan Undang-Undang tentang Minuman Beralkohol	DPR	
73.	Rancangan Undang-Undang tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual	DPR	
74.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	DPR	
75.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengasuhan Anak	DPR	
76.	Rancangan Undang-Undang tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial	DPR	

Paraf 1	Paraf 2
1	1

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
77.	Rancangan Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama	DPR	
78.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR	
79.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR	
80.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR	
81.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	DPR	
82.	Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian	DPR	
83.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	DPR	
84.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tenaga Kerja Honorer dan Tenaga Kerja Lepas (Pramubakti)	DPR	
85.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	DPR	
86.	Rancangan Undang-Undang tentang Buruh Pertanian/Perkebunan	DPR	
87.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan Masyarakat	DPR	
88.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	DPR	

Paraf 1	Paraf 2
<u>m</u>	{}

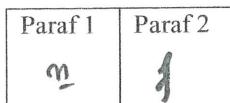
NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
89.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawas Ketenagakerjaan	DPR	
90.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengupahan	DPR	
91.	Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi	DPR	
92.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR	
93.	Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan	DPR	
94.	Rancangan Undang-Undang tentang Fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan	DPR	
95.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	DPR	
96.	Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi Agama Islam	DPR	
97.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	DPR	
98.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	DPR	
99.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	DPR	
100.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	DPR	

Paraf 1	Paraf 2

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
101.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan Talenta Nasional	DPR	
102.	Rancangan Undang-Undang tentang Persepakbolaan	DPR	
103.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	DPR	
104.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	DPR	
105.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	DPR	
106.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perekonomian Nasional	DPR	
107.	Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional	DPR	
108.	Rancangan Undang-Undang tentang Teknologi Keuangan (<i>Financial Technology</i>)	DPR	
109.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	DPR	
110.	Rancangan Undang-Undang tentang Aktivitas Ekonomi atas Negara Pendudukan	DPR	
111.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	DPR	

Paraf 1	Paraf 2
m	f

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
112.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	DPR	
113.	Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah	DPR	
114.	Rancangan Undang-Undang tentang Konsultan Pajak	DPR	
115.	Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia.	DPR	
116.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	DPR	
117.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	DPR	
118.	Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Wisata Khusus	DPR	
119.	Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kesusastraan	DPR	
120.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
121.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
122.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	DPR/PEMERINTAH/ DPD	



NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
123.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
124.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
125.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
126.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
127.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
128.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR/PEMERINTAH	
129.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	DPR/PEMERINTAH	
130.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional	DPR/PEMERINTAH	
131.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR/PEMERINTAH	
132.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	DPR/PEMERINTAH	

Paraf 1	Paraf 2
	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
133.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional	DPR/ PEMERINTAH	
134.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR/ PEMERINTAH	
135.	Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara (<i>Omnibus Law</i>)	DPR/ PEMERINTAH	<i>Omnibus Law</i>
136.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia	DPR/ PEMERINTAH	
137.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	DPR/ PEMERINTAH	
138.	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	DPR/ PEMERINTAH	RUU <i>Carry Over</i>
139.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	DPR/ PEMERINTAH	RUU <i>Carry Over</i>
140.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR/ PEMERINTAH	
141.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	DPR/ PEMERINTAH	
142.	Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	DPR/ PEMERINTAH	

Paraf 1	Paraf 2
¶	¶

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
143.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPR/PEMERINTAH	
144.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	DPR/PEMERINTAH	
145.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani	DPR/PEMERINTAH	
146.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	DPR/PEMERINTAH	
147.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	DPR/PEMERINTAH	
148.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DPR/PEMERINTAH	
149.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	DPR/PEMERINTAH	
150.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	DPR/PEMERINTAH	
151.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003	DPR/PEMERINTAH	

Paraf 1	Paraf 2

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	tentang Sistem Pendidikan Nasional		
152.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai	DPR/PEMERINTAH	
153.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR/PEMERINTAH	
154.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai	DPR/PEMERINTAH	
155.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	DPR/PEMERINTAH	
156.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	DPR/PEMERINTAH	
157.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR/PEMERINTAH	
158.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	DPR/PEMERINTAH	
159.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	DPR/PEMERINTAH	
160.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/DPD	
161.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000	DPR/DPD	

Paraf 1	Paraf 2
m	f

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh		
162.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	DPR/DPD	
163.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	DPR/DPD	
164.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	DPR/DPD	
165.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali	DPR/DPD	
166.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR/DPD	
167.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	DPR/DPD	
168.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR/DPD	
169.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	DPR/DPD	
170.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	DPR/DPD	

Paraf 1	Paraf 2
o1	1

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		
171.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	DPR/DPD	
172.	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR/DPD	
173.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	DPR/DPD	
174.	Rancangan Undang-Undang tentang Geologi	DPR/DPD	
175.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	DPR/DPD	
176.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR/DPD	
177.	Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR/DPD	
178.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	DPR/DPD	
179.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga	DPR/DPD	
180.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Pasien	DPR/DPD	
181.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	DPR/DPD	

Paraf 1	Paraf 2
an	1

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
182.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	DPR/DPD	
183.	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan	DPR/DPD	
184.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	PEMERINTAH	
185.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional	PEMERINTAH	
186.	Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara	PEMERINTAH	
187.	Rancangan Undang-Undang tentang Persandian	PEMERINTAH	
188.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Nasional	PEMERINTAH	
189.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	PEMERINTAH	
190.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	PEMERINTAH	
191.	Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan	PEMERINTAH	
192.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	PEMERINTAH	
193.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	PEMERINTAH	
194.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	

Paraf 1	Paraf 2

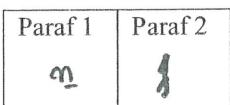
NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
195.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	PEMERINTAH	
196.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi	PEMERINTAH	
197.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha	PEMERINTAH	
198.	Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak	PEMERINTAH	
199.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	PEMERINTAH	
200.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional	PEMERINTAH	
201.	Rancangan Undang-Undang tentang Kekayaan Intelektual Komunal	PEMERINTAH	
202.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi	PEMERINTAH	
203.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	PEMERINTAH	
204.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antar-Negara	PEMERINTAH	
205.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	PEMERINTAH	
206.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973	PEMERINTAH	

Paraf 1	Paraf 2
2	1

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	tentang Landas Kontinen Indonesia		
207.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	PEMERINTAH	
208.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	PEMERINTAH	
209.	Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja (<i>Omnibus Law</i>)	PEMERINTAH	(<i>Omnibus Law</i>)
210.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	PEMERINTAH	
211.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	PEMERINTAH	
212.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender	PEMERINTAH	
213.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (<i>Omnibus Law</i>)	PEMERINTAH	(<i>Omnibus Law</i>)
214.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	PEMERINTAH	
215.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	PEMERINTAH	
216.	Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (<i>Omnibus Law</i>)	PEMERINTAH	(<i>Omnibus Law</i>)

Paraf 1	Paraf 2
¶	¶

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
217.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelaporan Keuangan	PEMERINTAH	
218.	Rancangan Undang-Undang tentang Penjaminan Polis	PEMERINTAH	
219.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Kekayaan Negara	PEMERINTAH	
220.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	PEMERINTAH	
221.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan	PEMERINTAH	
222.	Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia	PEMERINTAH	
223.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah	PEMERINTAH	
224.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	PEMERINTAH	
225.	Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi	PEMERINTAH	
226.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlelangan	PEMERINTAH	
227.	Rancangan Undang-Undang tentang Penilai	PEMERINTAH	
228.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	PEMERINTAH/DPD	
229.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan Daya Saing Daerah	DPD	



NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
230.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah	DPD	
231.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara	DPD	
232.	Rancangan Undang-Undang tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPD	
233.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	DPD	
234.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	DPD	
235.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketransmigrasian	DPD	
236.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa	DPD	
237.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	DPD	
238.	Rancangan Undang-Undang tentang Partisipasi Masyarakat	DPD	
239.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang	DPD	
240.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DPD	
241.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan	DPD	

Paraf 1	Paraf 2

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan		
242.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	DPD	
243.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial	DPD	
244.	Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah	DPD	
245.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus	DPD	
246.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah	DPD	
247.	Rancangan Undang-Undang tentang Investasi Penanaman Modal Daerah	DPD	
248.	Rancangan Undang-Undang tentang Pinjaman Daerah	DPD	
249.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	DPD	
250.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	DPD	
251.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	DPD	
252.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-	DPD	

Paraf 1	Paraf 2
	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan		
253.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara	DPD	
254.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Digital	DPD	

DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUMULATIF TERBUKA	
1.	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (DPR/Pemerintah)
3.	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

KETUA,

Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI ♂

Paraf 1	Paraf 2
¶	ʃ



LAPORAN KINERJA 2021

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL